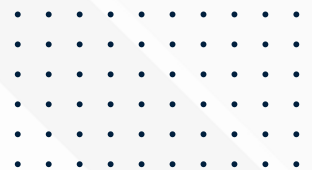


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) TAHUN 2025

TAHUN ANGGARAN 2026



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2025, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Didalam LKj-IP ini disajikan target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 yang meliputi yang meliputi 3 (tiga) sasaran strategis bidang pendidikan, yaitu (1) Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat, dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah, dan meningkatnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 (2) Sasaran Strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan, dengan indikator Rasio Ketersediaan SD/MI perpenduduk dan Rasio Ketersediaan SMP/MTs perpenduduk (3) Sasaran Strategis terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya dengan indikator meningkatnya persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal jenjang SD dan meningkatnya persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal jenjang SMP (4) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan dinas Pendidikan. Selain itu, dilaporkan pula capaian akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas kinerja keuangan APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur TA 2025.

Di pihak lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur menyadari bahwa tantangan pembangunan pendidikan masih cukup banyak, dan memerlukan kerja yang lebih keras pada tahun-tahun mendatang, Dengan dukungan dari semua pihak diharapkan tantangan dan masalah yang masih



harus ditangani sebagaimana ditargetkan, pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui LKj-IP ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan bidang Pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2025. Selain itu, LKj-IP ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur pada tahun-tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih.

Sangatta, Februari 2026

Kepala Dinas,



Mulyono, S.STP.,M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197702021997031004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai RPJMD Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026, Renstra Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2021-2026, serta Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 diarahkan untuk mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Hal ini ditujukan agar peserta memiliki akhlak mulia, bersikap kreatif, dan inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejalan dengan misi pendidikan nasional tersebut dan merespon perkembangan global abad 21 maka arah tujuan dan sasaran pendidikan di Kabupaten Kutai Timur dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Pertama, Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat.
- Kedua, Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya.
- Ketiga, Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan
- Keempat, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Dari keempat arah di atas pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang meningkat dari tahun 2024 sebesar 13,02 menjadi 13,22 di tahun 2025. Nilai ini dapat diartikan bahwa lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia minimal 7 tahun di Kabupaten Kutai Timur berpeluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Untuk angka Rata-rata lama Sekolah juga meningkat dari tahun 2024 sebesar 9,47 menjadi 9,48 pada tahun 2025. Nilai ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Kutai Timur telah mencapai 9,48 tahun pendidikan atau setara dengan jenjang SMP kelas IX atau kelas X Semester 1.



Capaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 secara umum dalam kategori **sangat memuaskan**. Diharapkan capaian-capaian indikator kinerja selalu meningkat setiap tahunnya, dan diperoleh pula hasil yang baik untuk bidang pendidikan khususnya.

Meskipun telah banyak kinerja dihasilkan selama tahun 2025, namun masih banyak permasalahan dalam bidang pendidikan yang perlu segera diselesaikan, seperti masih banyaknya sekolah jenjang SD yang perlu di rehab sedang/berat, masih banyaknya perlu penambahan ruang kelas baru, dan peningkatan sarana prasarana Pendidikan seperti mebel dan utilitas sekolah, serta masih banyaknya sekolah yang sudah meluluskan peserta didik tetapi belum mempunyai Gedung sekolah. Pada masa Pandemi seperti ini juga sangat perlu dilakukan peningkatan kualitas guru dalam meningkatkan inovasi pembelajaran abad 21 agar dapat menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini dan dapat meningkatkan kualitas Pendidikan baik jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C. Serta masih kurangnya kegiatan-kegiatan kebudayaan kearifan lokal yang dapat meningkatkan daya tarik Masyarakat luar untuk berkunjung ke Kabupaten Kutai Timur untuk menikmati seni, budaya dan adat yang ada di Kabupaten Kutai Timur.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

RINGKASAN EKSEKUTIF..... iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Tujuan Penulisan Laporan 4

1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 4

1.5 Aspek Strategis Organisasi..... 6

1.6 Struktur Organisasi 7

1.7 Uraian Tugas dan Fungsi..... 10

1.8 Sumber Daya Manusia..... 24

1.9 Sistematika Laporan 27

BAB II PERANCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 29

2.1 Rencana Strategis 29

2.1.1 Visi dan Misi 29

2.1.2 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra 43

2.1.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 43

2.1.2.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur..... 44

2.1.3 Tujuan dan Sasaran 45

2.1.4 Indikator Kinerja 51

2.1.5 Strategi dan Kebijakan 54

2.1.6 Program dan Kegiatan 57

2.1.7 Rencana Kinerja Tahunan..... 65

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 72

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 72

3.1.1 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 79

3.1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 80

3.1.3 Guru yang Memenuhi Kualifikasi D-IV / S1 82

3.1.4 Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD dan SMP 82

3.1.5 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD dan SMP .. 83



3.1.6 Angka Kelulusan (AL) 83

3.1.7 Angka Partisipasi Murni (APM) 84

3.1.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) 84

3.1.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS)..... 85

3.1.10 Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik 86

3.1.11 Rasio Siswa Per Guru (R-S/G) 86

3.1.12 Angka Putus Sekolah (AptS) 87

3.1.13 Angka Melanjutkan (AM)..... 87

3.2 Analisis Capaian Kinerja..... 88

 A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Taraf Pendiidkan Masyarakat..... 92

 1) Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini..... 92

 2) Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu 101

 3) Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 110

 4) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional..... 118

 5) Analisis Capaian Kinerja..... 119

 6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 121

 7) Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja 121

3.3 Tabel Rincian Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025..... 125

3.4 Realisasi Anggaran 132

BAB IV PENUTUP 145

4.1 Kesimpulan..... 145

4.2 Langkah Perbaikan..... 146

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai dan Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan..... 24

Tabel 1.2 Data Pegawai dan Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 26

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian 26

Tabel 2.1 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Kutai Timur 30

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran 47

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama 51

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Pendukung 52

Tabel 2.5 Strategi dan Arah Kebijakan 55

Tabel 2.6 Program dan Kegiatan 57

Tabel 2.7 Rencana Kinerja Tahunan 65

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..... 73

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 74

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Ajaran 2023/2024 dan 2024/205 88

Tabel 3.4 Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah Tahun 2024 Dan 2025 122

Tabel 3.5 Guru yang Memenuhi Kualifikasi D-IV/S1 Jenjang SD/MI Tahun Ajaran 2025/2026..... 125

Tabel 3.6 Guru yang Memenuhi Kualifikasi Kualifikasi D-IV/S1 Jenjang SMP/MTs Tahun Ajaran 2025/2026 126

Tabel 3.7 Jumlah Siswa Putus Sekolah Dasar (SD) Per Kecamatan Tahun Ajaran 2025/2026..... 127

Tabel 3.8 Jumlah Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Per Kecamatan Tahun Ajaran 2025/2026 128

Tabel 3.9 Angka Kelulusasn SD/MI Per Kecamatan Tahun Ajaran 2025/2026 129

Tabel 3.10 Angka Kelulusasn SMP/MTs Per Kecamatan Tahun Ajaran 2025/2026..... 130

Tabel 3.11 Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik Tahun Ajaran 2025/2026 131

Tabel 3.12 Rasio Guru dan Murid Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025/2026 131

Tabel 3.13 Angka Partisipasi Murni Tahun Ajaran 2025/2026 132

Tabel 3.14 Angka Partisipasi Kasar Tahun Ajaran 2025/2026 132

Tabel 3.15 Anggaran Persasaran 134



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur disusun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur memiliki dua fungsi, pertama merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati hasil pelaksanaan program kegiatan yang mendapatkan dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Fungsi kedua merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama



memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal.

Secara keseluruhan informasi dalam Laporan Kinerja tersebut berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja merupakan kinerja yang akan dicapai selama tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2025 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2025.

Selain mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025, juga mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi TA 2025, oleh sebab itu dalam laporan pelaksanaan hasil program dan kegiatan dilaporkan realisasi pelaksanaannya dari kedua sumber anggaran tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) hasil Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 200 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
4. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 181 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonstrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
14. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



16. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025.

1.3 TUJUAN PENULISAN LAPORAN

Tujuan Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 mempunyai tujuan melaporkan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran 2025 yang dikaitkan dengan proses pencapaian Indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai sarana bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur (Bupati) atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan. Selain itu sebagai bahan evaluasi, secara makro diantaranya pengembangan pendidikan. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

1.4 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pendayagunaan Aparatur Negara terus ditingkatkan, dimaksudkan agar kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayom kepada masyarakat dapat pula meningkat sejalan dengan dinamika laju pembangunan dan salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemerintah adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat khususnya peserta didik yang terencana dan diselenggarakan secara terus menerus, terpadu, sesuai dengan tuntutan tugas yang semakin meningkat. Sejalan dengan maksud tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu mengatur Peraturan Bupati Tugas Pokok,



Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

1. KEDUDUKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Dasar pembentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.

2. TUGAS POKOK

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2023, untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan kebudayaan;
- c. Perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Pendidikan dasar;
- d. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Pendidikan menengah;



- e. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Pendidikan luar sekolah;
- f. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- g. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- i. Pembinaan unit pelaksana Teknis Dinas; dan
- j. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional.

1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pergeseran dan perubahan struktural di bidang ekonomi dan tenaga kerja, percepatan perkembangan ilmu dan teknologi dan perubahan jenis keterampilan kerja yang diperlukan, akan menimbulkan sejumlah kecenderungan dan tantangan baru yang pada gilirannya berakibat kepada perubahan sistem pendidikan di masa depan. Diantara perubahan penting itu adalah :

1. Makin pentingnya orientasi nilai tambah (*value-added orientation*) terkait dengan makin mendesaknya kebutuhan untuk menaikkan tingkat produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi sebagai wahana untuk mempertahankan dan memperbaiki seluruh tatanan pembangunan sosial.
2. Perubahan dalam struktur sosial sebagai proses penemuan bentuk transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Transformasi ini timbul sebagai konsekuensi dari makin lajunya peran dan posisi sektor industri yang memerlukan berbagai keterampilan dan keahlian inovatif yang kondusif dengan perkembangan iptek.
3. Dampak dari proses globalisasi. Globalisasi yang semakin meluas dan masih tak dapat dihindari akan berpengaruh kepada kondisi sosial politik bahkan budaya bangsa Indonesia.

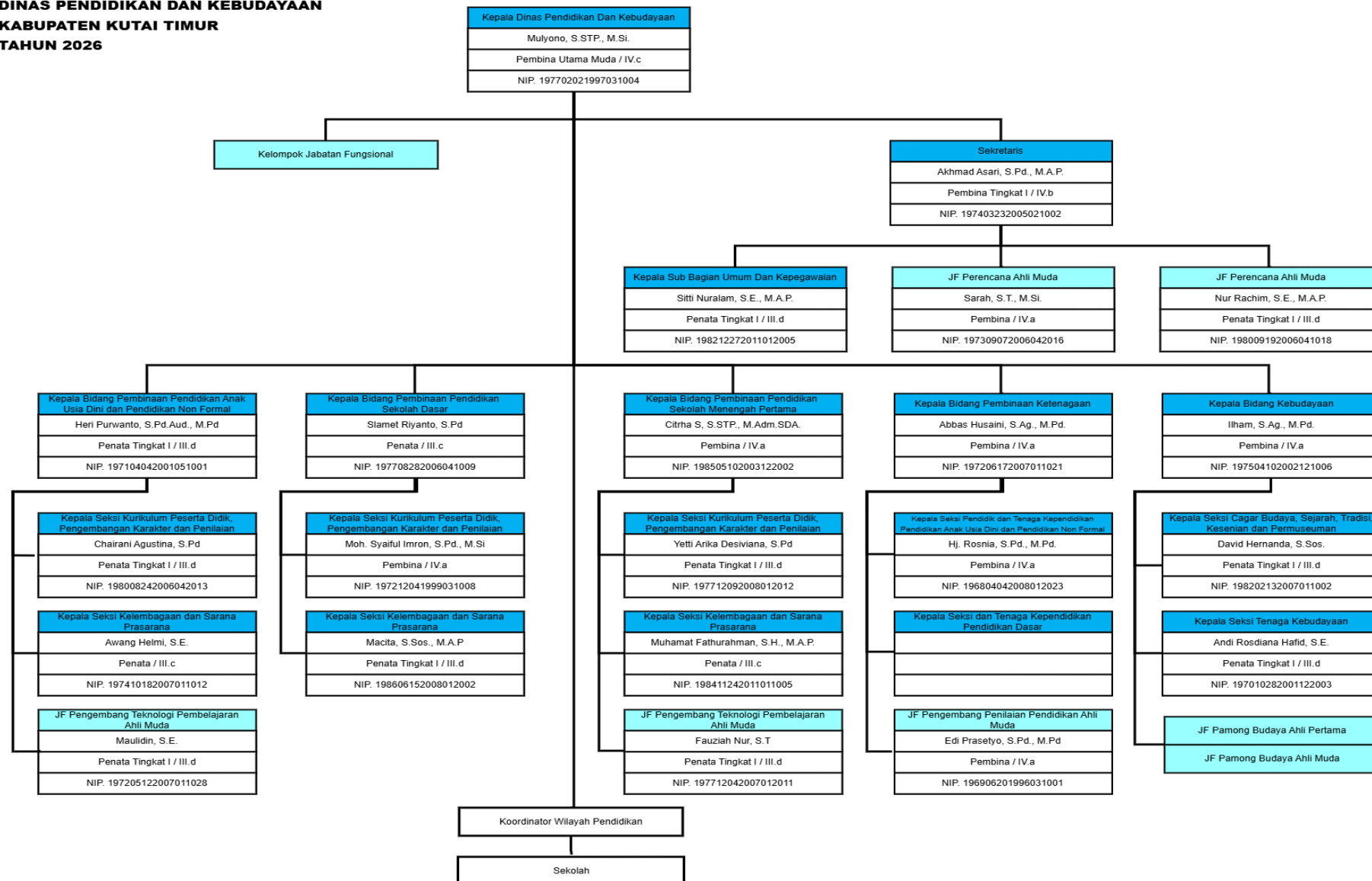


1.6 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur adalah Instansi Eselon II.
(Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur terlampir).



**STRUKTUR BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2026**





Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2023. Dalam Bab XX keputusan tersebut di atas menyebutkan bahwa Susunan Organisasi perangkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat** terdiri dari:
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. **Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
4. **Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar** terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
5. **Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah** terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
6. **Bidang Pembinaan Ketenagaan** terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
7. **Bidang Kebudayaan** terdiri dari:
 - a. Seksi Cagar Budaya, Sejarah, Tradisi, Kesenian dan Permuseuman;
 - b. Seksi Tenaga Kebudayaan.
8. **Kelompok Jabatan Fungsional**
9. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**



1.7 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tat usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program , kegiatan dan anggaran dibidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar, Pendidikan nonformal dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bisang Pendidikan dan kebudayaan;
- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar, Pendidikan nonformal dan kebudayaan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan Kerjasama di bidang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan nonformal dan kebudayaan;
- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Disdikbud;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan nonformal dan kebudayaan;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disdikbud;
- g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Disdikbud
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul



kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan Pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta Pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan Masyarakat di bidang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan nonformal dan kebudayaan;
- j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan nonformal dan kebudayaan;
- k. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Disdikbud; dan
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Disdikbud.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi :

- a. Persuratan;
- b. Tata Usaha;
- c. Kearsipan;
- d. Administrasi ASN;



- e. Perlengkapan;
- f. Rumah tangga; dan
- g. Penataan barang milik negara.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga dan administrasi perjalanan dinas;
- b. Pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
- c. Penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
- d. Pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara/ daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
- f. Penatausahaan Kepegawaian.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Disdikbud.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembanguna karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;



- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Nonformal;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, pentaan dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

4. Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan Pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan



- kriteria penilaian Pendidikan Nonformal;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik dan Pendidikan Nonformal;
 - e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik anak usia dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 - f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

5. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan



- dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

6. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar Disdikbud.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah dasar;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah dasar;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- d. Penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. Penyusunan bahan pembinaan Bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah dasar; dan
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan



Pembangunan karakter sekolah dasar.

7. Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan Pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Dasar;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar; dan
- f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar.

8. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana



- prasarana sekolah dasar;
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar; dan
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar.

9. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah menengah pertama pada Disdikbud.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta



peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan

- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah menengah pertama.

10. Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan Pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama; dan
- f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama.'



11. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama; dan
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.

12. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga Kebudayaan pada Disdikbud.

Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga Kebudayaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah



- Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga Kebudayaan;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga Kebudayaan;
 - d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
 - e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
 - f. Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga Cagar Budaya dan permuseuman, tenaga kesejahteraan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga Kebudayaan lainnya;
 - g. Penyusunan bahan permantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga Kebudayaan; dan
 - h. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga Kebudayaan.

13. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Nonformal;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga



- kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

14. Bidang Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

15. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang



Kebudayaan Disdikbud.

Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan Sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan Lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabuapten, pembinaan Sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan Lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- c. Penyusunan bahan pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- d. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang Masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- e. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan Lembaga adat yang Masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. Penyusunan bahan pembinaan Sejarah lokal kabupaten;
- h. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- i. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
- j. Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
- k. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan Sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lemabaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum



kabupaten, pembinaan Sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, dan Lembaga adat dan pembinaan kesenian; dan

m. Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan Sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan Lembaga adat dan pembinaan kesenian.

16. Seksi Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah, Tradisi dan Kesenian

Seksi Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah, Tradisi dan Kesenian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat serta permuseuman;
- b. Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- c. Penyusunan bahan pelestarian tradisi dan kesenian;
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, Sejarah, tradisi dan pemanfaatan museum;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang Sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan Lembaga adat;
- f. Penyusunan bahan penertiban izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
- h. Pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman.



17. Seksi Tenaga Kebudayaan

Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- b. Penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- d. Pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya.

1.8 SUMBER DAYA MANUSIA

Gambaran umum Sumber Daya Aparatur (personil) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur sampai dengan akhir Desember 2025 kondisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

**TABEL 1.1**

Data Pegawai dan Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan

Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

Profil Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan									
No.	Golongan	Pendidikan							Total
		S-3	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV/d	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV/c	1	13	12	0	0	0	0	26
	IV/b	0	23	129	0	0	0	0	152
	IV/a	0	33	95	0	0	0	0	128
	Total Gol IV	1	69	236	0	0	0	0	306
2	III/d	0	9	30	0	0	0	0	39
	III/c	0	21	408	0	0	0	0	429
	III/b	0	12	482	0	2	0	0	496
	III/a	0	57	502	0	8	0	0	567
	Total Gol III	0	99	1422	0	10	0	0	1531
3	II/d	0	0	4	3	15	0	0	22
	II/c	0	0	3	2	16	0	0	21
	II/b	0	0	4	3	6	0	0	13
	II/a	0	0	16	0	8	0	0	24
	Total Gol II	0	0	27	8	45	0	0	80
4	I/d	0	0	0	0	1	0	0	1
	I/c	0	0	0	0	2	0	0	2
	I/b	0	0	0	0	1	0	0	1
	I/a	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Gol.I	0	0	0	0	4	0	0	4
Total		1	168	1685	8	59	0	0	1921

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025



TABEL 1.2

Data Pegawai dan Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Berdasarkan Tingkat Eselon

	URAIAN	JUMLAH	%
1	- Eselon II	1	0.02
2	- Eselon III	6	0.13
3	- Eselon IV	10	0.21
4	- PNS	1921	40.63
5	- Pengawas Sekolah Madya	2807	59.37
5	- Pengawas Sekolah Muda	33	0.70
6	- PPPK	7	0.15
7	- TK2D/Honor	0	0
	JUMLAH	4728	100.00%

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

TABEL 1.3

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian

No	STATUS PEGAWAI	JUMLAH	%
1	- ASN	3968	82,58
2	- NON ASN	837	17,42
	Jumlah	4805	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025



1.8 SISTEMATIKA LAPORAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini yang pertama menyajikan Latar Belakang disusunnya Laporan Kinerja – Instansi Pemerintah (LKJ-IP) yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 dan kedua menyajikan tentang Tujuan Penulisan Laporan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana Dekonsentrasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang acuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2023-2024, yang kemudian dari Renstra tersebut akan di turunkan dalam bentuk Renja sebagai dasar Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang selanjutnya tertuang lebih terinci sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Capaian Kinerja dan Realisasi pelaksanaan dalam dokumen DPA tersebut di jabarkan dalam program dan kegiatan yang di syahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan pada tujuan dan sasaran strategis dengan indikator Kinerja dan capaiainya.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi sebagaimana dalam penjabarannya secara analisis capaian kinerja dinas sesuai dengan dokumen Renstra 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja dan capaiannya secara rinci dan jelas. Selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusinya serta Analisis Penggunaan sumber daya anggaran. Realisasi anggaran diuraikan berdasarkan sumber pendanaan. Selanjutnya



diselaraskan dengan realisasi anggaran PAD dan pendanaan APBD dan APBN yang diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 berlangsung. Berikut prestasi yang dihasilkan selama tahun 2025.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisikan penutup yang menguraikan tentang tiga hal yaitu kesimpulan, permasalahan dan kendala, serta langkah kedepan/rekomendasi yang dihasilkan setelah berlangsungnya dan pengembangan pendidikan, serta rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam mendukung pelaksanaan ditahun-tahun berikutnya.

Lampiran-Lampiran

1. Lampiran I
Matrik Adendum Renstra 2021-2026;
2. Lampiran II
Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025;
3. Lampiran III
Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
4. Lampiran IV
Penghargaan dan prestasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut perlu akuntabilitas instansi pemerintah disusun dalam suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Adapun komponen-komponen RENSTRA seperti tersebut dibawah ini :

2.1 RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan secara singkat di bab ini :

2.1.1 VISI DAN MISI

Setiap periode kepemimpinan kepala daerah harus merumuskan visi pembangunan daerah yang bersangkutan, demikian juga dengan Kabupaten Kutai Timur. Rumusan visi menggambarkan kondisi yang ingin



dicapai pada masa akhir jabatan Kepala Daerah. Adapun visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode 2021-2026 adalah:

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih:

“Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Asing”

Visi tersebut merupakan suatu cita-cita besar dalam rangka membangun daerah dan masyarakat Kutai Timur agar dapat berkembang secara berkelanjutan, menghadapi tantangan zaman, dengan memanfaatkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Unsur yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan adalah Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Secara lebih spesifik, penjelasan setiap unsur dalam visi ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Kutai Timur

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
1.	Kutai Timur	Bahwa sasaran capaian keberhasilan penerapan visi tersebut adalah untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.	Tangguh	Merujuk pada kemampuan Kutai Timur untuk bertahan, berkembang, dan menghadapi tantangan yang ada, baik yang berasal dari alam, sosial, politik maupun ekonomi. Daerah yang tangguh tidak hanya mampu bertahan dalam kondisi sulit, tetapi juga dapat pulih dan bangkit lebih kuat setelah menghadapi bencana atau krisis. Makna “tangguh” ini menekankan pada aspek-aspek berikut: o Ketahanan Ekonomi: Kabupaten Kutai Timur harus memfokuskan pembangunan ekonominya pada sektor-sektor yang dapat bertahan (<i>resilience</i>) terhadap fluktuasi pasar, bencana alam, atau perubahan kebijakan di Tingkat regional, nasional dan global.



		○ Ketahanan Sosial: Kutai Timur harus memiliki masyarakat yang memiliki daya tahan sosial yang tinggi, mampu mengatasi konflik, ketidaksetaraan, dan kemiskinan. ○ Ketahanan Politik: mencerminkan kondisi pemerintahan dan masyarakat yang memiliki ketahanan dalam menghadapi dinamika politik, dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang demokratis, stabil, dan akuntabel ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, serta terciptanya harmoni antara berbagai kepentingan politik demi mendukung Pembangunan daerah yang berkelanjutan ○ Manajemen Bencana dan Infrastruktur: Dengan risiko bencana alam, seperti banjir, kebakaran hutan, atau gempa bumi, wilayah ini harus memiliki system manajemen bencana yang tangguh dan infrastruktur yang mampu bertahan terhadap bencana alam. Perencanaan yang matang dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana sangat penting. ○ Kesiapsiagaan dan Adaptasi: Masyarakat dan pemerintah daerah perlu memiliki sistem dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan, baik perubahan iklim, ekonomi, maupun politik. Ini termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kutai Timur agar masyarakat dapat beradaptasi dengan baik dalam dunia yang terus berubah.
3.	Mandiri	Kutai Timur diharapkan mampu mengelola potensi sumber daya yang ada secara mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan atau intervensi dari luar. Hal ini mencakup kemandirian dalam ekonomi, pengelolaan pemerintahan, serta dalam pemberdayaan masyarakat. Makna “mandiri” ini menekankan pada aspek-aspek berikut:



		○ Ekonomi Lokal yang Kuat: Kabupaten Kutai Timur harus mampu mengelola secara optimal sektor-sektor unggulan yang ada di daerahnya, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata, agar dapat menciptakan ekonomi yang mandiri. Diversifikasi ekonomi menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor atau sumber daya alam saja misalnya ketergantungan pada sektor Pertambangan dan Penggalian. ○ Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM: Salah satu cara untuk mencapai kemandirian adalah melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan terhadap kewirausahaan lokal dan penguatan sumber daya manusia akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian daerah. ○ Sumber Daya Manusia yang Berkualitas: Kemandirian juga berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas, terutama tenaga kerja. Meningkatkan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar lokal akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu berinovasi, serta mengurangi ketergantungan pada pekerja dari luar daerah.
4.	Berdaya Saing	Kutai Timur harus mampu bersaing secara positif, baik ditingkat regional, nasional, maupun global, dalam hal ekonomi, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta daya Tarik bagi investor. Makna “berdaya saing” ini menekankan pada aspek-aspek berikut: ○ Infrastruktur Berkualitas: Agar Kutai Timur dapat bersaing, pembangunan infrastruktur yang mendukung, seperti transportasi, konektivitas digital, dan infrastruktur dasar lainnya, harus menjadi prioritas. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya saing



		dalam perdagangan, investasi, dan mobilitas masyarakat. ○ Inovasi dan Teknologi: Kutai Timur perlu mendorong inovasi di berbagai sektor, terutama di bidang teknologi dan industri berbasis digital. Penggunaan teknologi dalam sektor-sektor tradisional, seperti pertanian dan perikanan, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. ○ Pariwisata dan Branding Daerah: Dengan potensi alam dan budaya yang kaya, sektor pariwisata harus dikembangkan untuk menarik wisatawan lokal dan internasional. <i>Branding</i> daerah yang kuat, dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan khas Kutai Timur, akan meningkatkan daya saingnya sebagai destinasi wisata. ○ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Untuk dapat bersaing, SDM harus memiliki keahlian yang relevan dengan tuntutan pasar global. Peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program pengembangan kepemimpinan akan membantu masyarakat di Kutai Timur untuk berdaya saing. ○ Kebijakan Pemerintah yang Mendukung: Pemerintah daerah harus memiliki kebijakan yang mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi dunia usaha, seperti insentif bagi investor, regulasi yang mempermudah bisnis, serta penciptaan peluang-peluang baru bagi pelaku usaha.
--	--	---

Visi Kabupaten Kutai Timur periode 2025-2029 menitikberatkan pada pemerataan pembangunan baik infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia serta disertifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor tambang, sehingga dapat terwujud kondisi Kutai Timur yang tangguh, mandiri dan berdaya saing dan kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kutai Timur. Hal ini sejalan dengan keinginan dari RPJMN 2025-2029. Narasi “Indonesia Maju” dalam RPJMN 2025-2029 dimaknai oleh Kutai Timur sebagai perwujudan saerah yang



“Tangguh” dan “Mandiri”, serta Narasi “Indonesia Emas 2045” dimaknai oleh Kutai Timur sebagai perwujudan daerah yang memiliki “Daya Saing”.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan misi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

1. Misi 1: "Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui

Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas serta Berprestasi."

Peningkatan daya saing berarti meningkatkan kemampuan suatu daerah atau Masyarakat untuk bersaing dengan daerah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi. Sedangkan pemerataan daya saing memiliki makna bahwa hasil pembangunan harus merata ke semua wilayah dalam suatu daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, dan memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan bersaing.

Misi peningkatan dan pemerataan daya saing ini akan difokuskan pada:

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - SDM yang unggul akan menjadi kunci utama dalam Pembangunan berbagai aspek di Kutai Timur.
 - Dengan meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan moral masyarakat, Kutai Timur dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
 - Masyarakat yang cerdas dan terampil akan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan industri dan teknologi.
- b. Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi
 - Pemerataan pembangunan akan membantu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Kutai Timur.
 - Dengan adanya akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, masyarakat di seluruh wilayah bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.
 - Ketimpangan dalam pembangunan bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial, sehingga pemerataan menjadi kunci untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
- c. Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
 - Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan mampu berkontribusi lebih baik dalam pembangunan daerah.



- Akses layanan kesehatan yang lebih baik akan mengurangi angka kematian, meningkatkan harapan hidup, dan menciptakan generasi yang lebih kuat secara fisik dan mental.
 - Gizi yang baik dan pola hidup sehat akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan belajar anak-anak serta produktivitas tenaga kerja.
 - d. Menjaga Identitas Budaya dan Moralitas Masyarakat
 - Nilai-nilai budaya lokal perlu dijaga agar tidak tergerus oleh modernisasi yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat Kutai Timur.
 - Masyarakat yang berbudaya akan lebih memiliki rasa kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial yang tinggi.
 - Pendidikan berbasis moral akan menghasilkan generasi yang memiliki akhlak baik, menjunjung tinggi etika, dan mampu menjadi pemimpin yang berintegritas di masa depan.
 - e. Meningkatkan Prestasi dan Daya Saing Daerah
 - Mendorong prestasi di berbagai bidang (pendidikan, olahraga, seni, dan ekonomi) akan membantu meningkatkan citra Kutai Timur sebagai daerah yang maju dan inovatif.
 - Prestasi yang tinggi akan menarik lebih banyak investasi, meningkatkan pariwisata, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
 - Dengan daya saing yang meningkat, Kutai Timur bisa menjadi salah satu daerah terdepan di Kalimantan Timur, baik dalam pembangunan SDM maupun sektor ekonomi lainnya.
- 2. Misi 2: "Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan."**
- Misi ini menekankan pentingnya transformasi/perubahan dan penguatan struktur ekonomi di Kutai Timur dengan mengandalkan sektor-sektor utama yang menjadi potensi daerah.
- Secara lebih spesifik misi ini difokuskan pada:
- a. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi berarti mengubah dan meningkatkan struktur ekonomi agar lebih kuat, berkelanjutan, dan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Ini mencakup:

 - **Diversifikasi ekonomi**, Kutai Timur tidak boleh hanya bergantung pada sektor pertambangan, tetapi juga mengembangkan sektor lain yang lebih berkelanjutan.
 - **Meningkatkan nilai tambah**, pembangunan ekonomi di Kutai Timur harus mampu mendorong hilirisasi industri, misalnya



- pengolahan hasil pertanian dan perikanan agar bernilai lebih tinggi sebelum dijual.
- **Pemanfaatan teknologi dan inovasi**, dilakukan melalui adopsi teknologi baru dalam pertanian, perikanan, dan industri agar lebih efisien dan produktif.
- b. **Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal**
Kutai Timur memiliki potensi besar dalam beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi secara berkelanjutan, antara lain:
- **Pertanian dan Perkebunan**, melalui pengembangan tanaman unggulan seperti sawit, nenas, kakao, karet, dan hortikultura, serta meningkatkan kesejahteraan petani dengan akses modal dan pasar yang lebih baik.
 - **Kehutanan**: Mendorong pengelolaan hutan secara lestari untuk menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi.
 - **Pariwisata**: Mengembangkan ekowisata dan wisata budaya untuk menarik wisatawan serta meningkatkan pendapatan daerah.
 - **Peternakan dan Perikanan**: Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan dengan pendekatan modern agar lebih produktif dan berkelanjutan.
 - **Kelautan**: Mengoptimalkan potensi laut dan pesisir dengan meningkatkan infrastruktur perikanan serta mendukung nelayan dengan teknologi dan akses pasar.
3. Misi 3 : ‘Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas.’
Misi ini berfokus pada perbaikan sistem pemerintahan agar lebih kuat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Beberapa hal yang menjadi fokus dalam misi ini, adalah:
- a. **Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh**
Tata kelola pemerintahan yang tangguh berarti pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini mencakup:
- **Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan** : Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) agar lebih produktif dan inovatif dalam melayani masyarakat.
 - **Mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi** Digitalisasi layanan publik untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
 - **Meningkatkan ketahanan birokrasi** : Pemerintahan harus mampu menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan



- regulasi, krisis ekonomi, dan bencana, dengan kebijakan yang cepat dan tepat.
- **Peningkatan pelayanan publik** : Memastikan semua layanan pemerintahan, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan bantuan sosial, berjalan dengan cepat dan tanpa hambatan.
- b. Pemerintahan yang Berintegritas
- Integritas dalam pemerintahan berarti menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab, tanpa korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Ini mencakup:
- **Transparansi dalam pengelolaan anggaran**: Menggunakan anggaran daerah secara ekonomis, efisien dan efektif, transparan, bertanggungjawab agar masyarakat tahu bagaimana uang mereka digunakan.
 - **Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)**: Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan agar kebijakan yang dibuat benar-benar untuk kepentingan rakyat.
 - **Partisipasi masyarakat dalam pengawasan**: Seoptimal mungkin melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah dan pelayanan publik.
 - **Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara**: Dengan memberikan gaji dan tunjangan yang layak, diharapkan ASN lebih fokus dalam bekerja dan tidak tergoda untuk melakukan korupsi.
4. Misi 4 “Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintahan yang Berintegritas.”
- Misi ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur fisik dan digital untuk memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan.
- Misi ini menekankan pada:
- a. Peningkatan Infrastruktur Dasar
- Infrastruktur dasar adalah fasilitas fisik yang menjadi fondasi utama dalam mendukung kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Fokus utama peningkatan infrastruktur dasar meliputi:
- **Jalan dan transportasi** : Membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, serta sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas ke daerah terpencil.



- **Listrik dan air bersih** : Memastikan seluruh masyarakat, termasuk di pedesaan, memiliki akses listrik yang stabil dan air bersih yang cukup.
 - **Fasilitas pendidikan dan kesehatan** : Meningkatkan jumlah dan kualitas sekolah, puskesmas, serta rumah sakit agar pelayanan kepada Masyarakat lebih merata.
 - **Perumahan dan sanitasi** : Menyediakan hunian yang layak dan system pembuangan limbah yang baik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Peningkatan Infrastruktur Digital
- Di era digital, teknologi menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Peningkatan infrastruktur digital akan difokuskan pada:
- **Internet dan jaringan telekomunikasi** : Memperluas akses internet ke seluruh wilayah, termasuk daerah pelosok, agar masyarakat bisa menikmati layanan digital seperti *e-commerce*, pendidikan daring, dan *telemedicine*.
 - **Sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)** : Menerapkan layanan digital dalam administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
 - **Transformasi digital di sektor ekonomi** : Mendorong penggunaan teknologi digital dalam sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM agar lebih kompetitif di pasar nasional maupun global.
 - **Edukasi dan literasi digital** : Memberikan pelatihan kepada Masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan menghindari dampak negatif dunia digital.
- c. Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah
- Konektivitas antarwilayah sangat penting untuk pemerataan pembangunan.
- Fokus peningkatan konektivitas antar wilayah ini adalah:
- **Membangun akses transportasi yang lebih baik** antara kota dan desa agar distribusi barang dan jasa lebih lancar.
 - **Mempermudah mobilitas masyarakat** dengan menyediakan sarana transportasi umum yang terjangkau dan nyaman.
 - **Meningkatkan akses ke pasar dan pusat ekonomi** bagi pelaku usaha di daerah terpencil agar mereka dapat menjual produknya lebih luas.
 - **Menghubungkan desa dengan kota melalui jaringan internet** agar masyarakat desa dapat mengakses layanan digital dan informasi secara lebih mudah.
- d. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berintegritas



Peningkatan infrastruktur yang memadai dapat mendukung tata Kelola pemerintahan yang lebih transparan dan profesional. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- **Penerapan sistem e-Government** dalam upaya untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik.
- **Digitalisasi layanan administrasi publik** agar masyarakat dapat mengakses dokumen kependudukan, perizinan, dan layanan lainnya dengan cepat, transparan dan tanpa pungli.
- **Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan anggaran** untuk memastikan dana pembangunan digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif (3E).

5. Misi 5 “Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu dan Berkesinambungan”

Misi ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan pendekatan yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan yang baik akan memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam.

Elemen penting yang menjadi fokus misi ini adalah:

- a. **Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu**
Pengelolaan lingkungan yang terpadu berarti mengelola sumber daya alam secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*), seperti pemerintah, masyarakat, dan industri. Hal ini mencakup:
 - **Pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan** guna mencegah deforestasi dan degradasi lahan akibat aktivitas perkebunan, pertambangan, dan perumahan.
 - **Pengendalian pencemaran lingkungan** guna menekan pencemaran air, udara, dan tanah dari industri dan aktivitas domestik agar lingkungan tetap sehat.
 - **Peningkatan tata kelola sampah dan limbah** melalui penerapan system pengelolaan sampah berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
 - **Pemanfaatan energi ramah lingkungan** guna mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan biogas, guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
- b. **Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkesinambungan**
Merupakan pendekatan strategis jangka panjang yang bertujuan menjaga keseimbangan alam dan melestarikan sumber daya agar tetap bermanfaat bagi generasi mendatang. Ini mencakup:
 - **Rehabilitasi dan konservasi ekosistem**



Merupakan adalah upaya untuk memulihkan, melindungi, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem agar tetap berfungsi secara optimal, termasuk melalui kegiatan seperti reboisasi, perlindungan lahan gambut, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

- **Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim**

Adalah strategi untuk menghadapi dampak perubahan iklim dengan mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan lingkungan serta masyarakat, seperti pembangunan tanggul, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), dan penghijauan kota.

- **Pendidikan dan kesadaran lingkungan**

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui kampanye, edukasi, dan partisipasi aktif dalam gerakan lingkungan.

- **Penerapan kebijakan ramah lingkungan**

Mendorong peraturan yang lebih ketat terhadap industri agar mereka menjalankan bisnis dengan memperhatikan dampak lingkungan.

c. **Keseimbangan Antara Pembangunan dan Kelestarian Alam**

Fokus ini juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.

Beberapa hal yang menjadi fokus adalah:

- **Menerapkan konsep pembangunan hijau (*green development*)** : Mengembangkan proyek infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti bangunan hemat energi dan transportasi hijau.

- **Mendukung ekonomi berbasis lingkungan** : Mendorong usaha yang berbasis ekowisata, pertanian organik, dan industri hijau yang tidak merusak alam.

- **Menjaga keseimbangan ekosistem laut dan pesisir** : Melindungi kawasan mangrove, terumbu karang, dan ekosistem pesisir yang berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Hubungan antara kelima misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Hubungan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Timur

Visi pembangunan jangka menengah Kutai Timur difokuskan pada transformasi Sosial (pada misi 1) dan transformasi Ekonomi (pada misi II). Fokus transformasi ini akan didukung oleh fondasi transformasi Tata Kelola (pada misi III) dan peningkatan Infrastruktur (pada misi IV) yang kesemuanya itu akan bermuara pada keberlanjutan Lingkungan Hidup (pada misi V).

Upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan dengan cara peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Untuk prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 pada sektor Pendidikan, yaitu;

1. Gratis Bantuan Seragam dan Buku Sekolah
2. Beasiswa Kutim tuntas bagi pelajar dan mahasiswa
3. Peningkatan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) negeri dan swasta
4. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan
5. Bantuan seragam bagi guru negeri dan swasta



6. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan seluruh kecamatan
7. Mendorong pencapaian standar akreditasi A bagi sekolah negeri dan swasta

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan visinya terdapat Misi pertama yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu. Untuk mewujudkan tujuan itu maka dalam RPJMD telah ditetapkan sasaran yang harus dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan prioritas yaitu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dan terwujudnya SDM yang Beriman, Berakhlak Mulia dan Berbudaya. Sedangkan untuk mencapai tujuan diperlukan indikator agar arah kebijakan dapat berjalan sesuai sasaran. Adapun sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD adalah Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat. Adapun indikator sasaran dalam RPJMD di Kabupaten Kutai Timur di bidang Sumber Daya Manusia yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang indikatornya adalah **Angka Harapan Lama Sekolah dari 13,22 tahun 2025 menjadi 13,30 tahun pada akhir tahun 2026.**

Selanjutnya Misi ketiga, yaitu Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional. Adapun sasarannya yaitu, meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan, dengan indikator sasaran, yaitu **Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah (SD) dari 45,90 tahun 2025 menjadi 56,88 pada akhir tahun 2026, Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah (SMP) dari 40,07 tahun 2025 menjadi 53,56 pada akhir tahun 2026.**

Misi empat, yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi. Adapun sasarannya, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan indikator sasaran, yaitu **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan sebesar 100% tahun 2025 dan pada tahun akhir 2026.**



2.1.2 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS K/L DAN RENSTRA

2.1.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi Pendidikan nasional, Kemdikbud mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kami/Insan Paripurna).

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar Bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu Pendidikan dan memajukan kebudayaan, kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presidean pada RPJMN tahun 2020-2024, serta visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi tersebut, kemdikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Misi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung pencapaian visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi 1 Peningkatan kualitas manusia Indonesia; misi 5



kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan misi 8 pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Untuk itu, misi kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita Kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan sastra
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan.

2.1.2.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Sejalan dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, tujuan dan fungsi Pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditetapkanlah visi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sebagai berikut:

“Berani Untuk Kaltim Berdaulat”

Visi tersebut menjelaskan bahwa:

1. Berani

Pemerintah mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimal kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Berdaulat

- a. Kalimantan Timur memiliki **kemantapan** dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik



- b. Kalimantan Timur mampu mewujudkan **kemandirian** dan dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
- c. Kalimantan Timur mampu mewujudkan **kemandirian** dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- d. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia berkarakter, berkualitas dan memiliki **daya saing**.

Telaahan terhadap Pendidikan tertuang pada Misi 1 yaitu berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Misi ini mempunyai tujuan mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur adalah peningkatan mutu dan akses Pendidikan melalui:

- 1. Peningkatan kualitas layanan Pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja
- 2. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri terpadu (Boarding School)
- 3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT
- 4. Pemberian bantuan biaya Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
- 5. Peningkatan sapsras Pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh
- 6. Pengembangan Perpustakaan berbasis IT

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus



dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi untuk kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kutai Timur dituangkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:



TABEL 2.2
TUJUAN DAN SASARAN

No	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Menata dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dengan Mendorong Kehidupan Masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya, dan bersatu.	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.89	12.90	13.00	13.10	13.20	13.30
			Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.19	9.20	9.35	9.45	9.55	10.00
			Meningkatnya Presentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi D-IV/S1	%	97.03	98.03	98.53	99.03	99.53	100.00
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang	Terwujudnya SDM yang beriman,	Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan	%	98.67	100	100	100	100	100



No	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya	berakhlak mulia, dan berbudaya	Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD							
			Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	%	86.21	91.95	94.25	95.40	96.55	100
	Menata Semua Layanan Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)		56.46	56.48	56.58	56.68	56.78	56.88
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)		53.06	53.16	53.26	53.36	53.46	53.56



No	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel Berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Menata dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dengan Mendorong Kehidupan Masyarakat (SDM) yang Berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu	Terwujudnya SDM yang beriman berakhlak mulia dan berbudaya	Ketua Adat yang Menerima Insentif	Orang	-	25	25	141	141	141
			Penyelenggaraa n Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	5	5	5	6	6	7
			Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah	Fasilitasi	-	20	20	25	30	35
			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Deilstarikan	Benda/Si tus/Kawa san	42	43	43	43	43	43



No	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya	%	100	100	100	100	100	100



2.1.4 INDIKATOR KINERJA

Untuk mengukur pencapaian kinerja program pembangunan pendidikan di atas, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur menetapkan berbagai indikator kinerja utama sekaligus targetnya sebagai parameter keberhasilan pada masing-masing pilar tersebut. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025:

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	1	Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,20
		2	Meningkatnya Angka rata-rata lama sekolah (RLS)	9,55
		3	Meningkatnya Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi D-IV/S1	99,53
2	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya	1	Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	100,00
		2	Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	96,55
		3	Ketua Adat yang Menerima Insentif	141
		4	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	6
		5	Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah	30



No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
		6	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	43
		7	Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya	100
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	1	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia (SD/MI)	56,78
		2	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia (SMP/MTs)	53,46

TABEL 2.4
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Pendukung	Target 2025
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	98,66
		2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	66,84
		3	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD)	72,57
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	105,71
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B	81,37
		6	Angka Partsipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	68,51
		7	Angka Partsipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun Pendidikan Dasar	100,00
		8	Angka Partsipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun Pendidikan Dasar	100,00
		9	Angka Partsipasi Sekolah (APS) 7-18 Pendidikan Kesetaraan	37,38
		10	Rasio Murid/Guru (SD)	20



No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Pendukung	Target 2025
		11	Rasio Murid/Guru (SMP)	20
		12	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,05
		13	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	0,05
		14	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00
		15	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00
		16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	85,46
		17	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	38,35
		18	Kemampuan Numerasi SD	53,61
		19	Kemampuan Numerasi SMP	63,57
		20	Kemampuan Literasi SD	61,95
		21	Kemampuan Literasi SMP	72,67
		22	Iklim Kebinekaan SD	73,60
		23	Iklim Kebinekaan SMP	72,54
		24	Iklim Keamanan SD	74,89
		25	Iklim Keamanan SMP	72,55
		26	Iklim Inklusivitas SD	59,91
		27	Iklim Inklusivitas SMP	60,27
		28	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	59,18
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	64,45
		2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	63,99



No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Pendukung	Target 2025
		3	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	38,35
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	100.00

2.1.5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, serta mengacu kepada RPJMD 2021-2026 dan evaluasi capaian pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2025. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta seluruh pelaksana pada tingkat satuan pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaahan terhadap sasaran strategis yang telah diuraikan terdahulu akan terlihat sejumlah unsur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.



TABEL 2.5
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua				
MISI I : Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu. (M1.T1)	Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat (M1.T1.S2)	Peningkatan taraf pendidikan (M1.T1.S2.ST1)	1. Percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari masyarakat yang tidak mampu melalui BOSDA dan Beasiswa Kutim Tuntas. (M1.T1.S2.ST1.AK1)
				2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (M1.T1.S2.ST1.AK2)
				3. Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik secara merata (M1.T1.S2.ST1.AK3)
				4. Penguatan kelembagaan sekolah melalui peningkatan akreditasi (M1.T1.S2.ST1.AK4)
		4. Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1, T1, S4)	Meningkatnya Pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat (M1, T1, S4, ST1)	1. Peningkatan Pengamalan nilai-nilai agama dan budaya di lingkungan Pendidikan sebagai muatan lokal (M1, T1, S4, ST1, AK1)
MISI III : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional				



2	Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4.ST1)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah (M3.T1.S4.ST1.AK1)
MISI IV : Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif berbasis penegakan Hukum dan Teknologi Informasi				
3	Menata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4, T1)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4, T1, S1)	Peningkatan Efisiensi pada berbagai pelayanan public berbasis elektronik/ teknologi informasi (M4, T1, S1, ST1)	Peningkatan Akuntabilitas Publik kapasitas Pemerintahan (<i>capacity building</i>) (M4, T1, S1, ST1, AK2)



2.1.6. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur menetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 2.6
PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				3	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				2	Pengadaan Sarana dan Prasarana



No.	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU
				2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				5	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah
				6	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU
				7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
				8	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala



No.	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
					Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah
				9	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				10	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
				11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
				14	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
				15	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
				16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
				17	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
				18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU
				2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				4	Pembangunan Laboratorium
				5	Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula
				6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah
				7	Pembangunan Kantin Sekolah
				8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah



No.	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
				9	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas
				10	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasaranan dan Utilitas Sekolah
				11	Pengadaan Mebel Sekolah
				12	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				13	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
				14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
				17	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
				18	Pembinaan, Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				19	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				20	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				21	Pembangunan Ruang Kelas Baru
				22	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
				23	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				24	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik



No.	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
		3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				2	Pengadaan Mebel PAUD
				3	Pengadaan Perlengkapan PAUD
				4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
				5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				6	Pengelolaan Dana BOP PAUD
				7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
				8	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				9	Pembangunan Ruang Kelas Baru
				10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
				11	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
				12	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
				13	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				14	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				15	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
				16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan
				2	Pengelolaan Dana BOP Sekolah



No.	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
					Nonformal/ Kesetaraan
				3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				4	Pembangunan Ruang Kelas Baru
				5	Pengadaaan Perlengkapan Sekolah
				6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
				2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
4	Program Pengembangan Kebudayaan	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
				2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan Semua Kelurahan/ Desa
		2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				2	Pembinaan Sumber Daya Manusia,



No.	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
					Lembaga, dan Pranata Tradisional
				3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat
				2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
				2	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
				3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
6	Program Pembinaan Sejarah	1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota
				2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
				3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya



No.	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
		2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	1	Pelindungan Cagar Budaya
8	Program Pengelolaan Permueseuman	1	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum



2.1.7. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur sebagai salah satu SKPD Kabupaten Kutai Timur dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan baik di Pusat, Provinsi, maupun Daerah Kabupaten Kutai Timur, hal tersebut sebagai konsekuensi logis karena penyelenggaraan kewenangan di bidang pendidikan tidak semua diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi ada yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) merupakan dasar hukum bahwa tugas pemerintahan dibidang pendidikan ditetapkan didalam satu sistem pendidikan nasional.

Mengacu kepada kewenangan dan strukturisasi program dan kegiatan tersebut maka dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ini ditetapkan program-program pembangunan bidang pendidikan yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai dalam visi, misi, arah kebijakan dan tujuan pembangunan pendidikan tahun 2021-2026.

TABEL 2.7
RENCANA KINERJA TAHUNAN

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	1	Angka rata-rata lama sekolah	9,55
		2	Angka Harapan Lama Sekolah	13,20
		3	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	72,57
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	105,71
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	81,37
		6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	68,51
		7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun Pendidikan Dasar	100,00
		8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun Pendidikan Dasar	100,00



No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target 2025
		9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun Pendidikan Kesetaraan	37,38
		10	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,66
		11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	66,84
		12	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,05
		13	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,05
		14	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100.00
		15	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00
		16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	85,46
		17	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	99,53
		18	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	59,18
		19	Rasio Murid/guru (SD)	20
		20	Rasio Murid/guru (SMP)	20
		21	Kemampuan Numerasi SD	53,61
		22	Kemampuan Numerasi SMP	63,57
		23	Kemampuan Literasi SD	61,96
		24	Kemampuan Literasi SMP	72,67
		25	Iklim Kebinekaan SD	73,60
		26	Iklim Kebinekaan SMP	72,54
		27	Iklim Keamanan SD	74,89
		28	Iklim Keamanan SMP	72,55
		29	Iklim Inklusivitas SD	59,91
		30	Iklim Inklusivitas SMP	60,27
		31	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	59,18
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	1	Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah (SD)	56,78



No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target 2025
		2	Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah (SMP)	53,46
		3	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	64,45
		4	Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik	63,99
		5	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	38,35
3	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya	1	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	100,00
		2	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	96,55
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	100,00
5	Terwujudnya SDM yan beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya	1	Jumlah Ketua Adat yang Menerima Insentif	175
		2	Penyelenggaraan Festival dan Seni Budaya	6
		3	Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah	11
		4	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	43
		5	Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya	100,00



LAMPIRAN I
MATRIKS RENSTRA 2021-2026
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.89	12.89	12.90	13.00	13.10	13.20	13.30
2.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.19	9.19	9.20	9.35	9.45	9.55	10.00
3.	Presentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi D-IV/S1	%	97.03	97.03	98.03	98.53	99.03	99.53	100.00
4.	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	%	98.67	98.67	100	100	100	100	100
5.	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	%	86.21	86.21	91.95	94.25	95.40	96.55	100
6.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)		56.46	56.46	56.48	56.58	56.68	56.78	56.88
7.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)		53.06	53.06	53.16	53.26	53.36	53.46	53.56



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
9.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100
10.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	90.66	90.66	92.66	94.66	96.66	98.66	100
11.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	58.84	58.84	60.84	62.84	64.84	66.84	70.00
12.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	60.57	60.57	63.57	66.57	69.57	72.57	75.57
13.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	97.71	97.71	99.71	101.71	103.71	105.71	107.71
14.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	73.37	73.37	75.37	77.37	79.37	81.37	83.37
15.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	%	94.12	94.12	95.12	96.12	97.12	100	100
16.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	%	66.30	66.30	68.30	70.30	72.30	100	100
17.	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	52.45	52.45	55.45	58.45	61.45	64.45	67.45
18.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	51.99	51.99	54.99	57.99	60.99	63.99	66.99
19.	Rasio Murid/Guru (SD)		17.84	17.84	20	20	20	20	20



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20.	Rasio Murid/Guru (SMP)		14.92	14.92	20	20	20	20	20
21.	Angka Putus Sekolah (AptS) SD/MI	%	0.28	0.28	0.20	0.15	0.10	0.05	0.00
22.	Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs	%	0.19	0.19	0.16	0.13	0.10	0.05	0.00
23.	Angka Melanjutan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	77.46	77.46	79.46	81.46	83.46	85.46	87.46
24.	Guru yang Sudah Sertifikasi	%	31.96	31.96	41.96	51.96	61.96	71.96	81.96
25.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
26.	Ketua Adat yang Menerima Insentif				100	125	150	175	200
27.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		5	5	5	5	6	6	7
28.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan		42	42	43	43	43	43	45
29.	Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah		8	8	8	9	10	11	12



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
30.	Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya		100	100	100	100	100	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur adalah perwujudan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran Kinerja merupakan inti dari akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan (Kegiatan) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pengukuran tersebut merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa, *Input*, *Output* dan *Outcome*. Pengukuran tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja baik dari Internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, berasal dari sistem informasi yang ada maupun dari Eksternal Pemerintah.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk merealisasikan setiap target kinerja dalam sasaran strategis. Keberhasilan pencapaian target kinerja merupakan ukuran keberhasilan/kegagalan setiap program. Dengan tercapainya target kinerja

tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Pada Pelaporan LKJ-IP tahun 2025 ini ada perubahan nilai target dari tahun sebelumnya dikarenakan disesuaikan dengan Target RPJMD Kabupaten Kutai Timur dan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur dengan melihat Capaian 2 (dua) Tahun sebelumnya yaitu 2023-2024. Penentuan target ini juga disesuaikan dengan kondisi Negara Indonesia yang mengalami Bencana Nasional pada awal tahun 2020 yang berdampak langsung terhadap Kondisi Keuangan Kabupaten Kutai Timur, sehingga perlu dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1
SKALA PENGUKURAN KINERJA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Nilai : $90 \leq 100$	Sangat Tinggi (ST)
2	Nilai : $76 \leq 90$	Tinggi (T)
3	Nilai : $66 \leq 75$	Sedang (S)
4	Nilai : $51 \leq 65$	Rendah (R)
5	Nilai : ≤ 50	Sangat Rendah (SR)



TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,20	13,22	100,00
		2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,55	9,48	99,27
		3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	99,53	100,00	100,00
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	98,66	95,83	97,13
		5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	66,84	88,32	100,00
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	72,57	95,35	100,00
		7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	105,71	105,64	99,93
		8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	81,37	107,12	100,00
		9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Pendidikan	%	68,51	84,13	100,00



No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			Anak Usia Dini (PAUD)				
		10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Pendidikan Dasar	%	100,00	99,60	99,60
		11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Pendidikan Dasar	%	100,00	99,97	99,97
		12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	%	37,38	44,62	100,00
		13	Rasio Murid/Guru (SD)	Rasio	20	15,66	78,30
		14	Rasio Murid/Guru (SMP)	Rasio	20	13,93	69,65
		15	Angka Putus Sekolah (AptS) SD/MI	%	0,05	0,03	100,00
		16	Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs	%	0,05	0,10	99,95
		17	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	100,00
		18	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00



No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		19	Angka Melanjutan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	85,46	90,82	100,00
		20	Iklim Inklusivitas SD	%	59,91	55,98	93,44
		21	Iklim Inklusivitas SMP	%	60,27	60,45	100,00
		22	Iklim Keamanan Sekolah SD	%	74,89	70,74	94,46
		23	Iklim Keamanan Sekolah SMP	%	72,55	70,93	97,77
		24	Iklim Kebhinekaan SD	%	73,60	65,44	88,91
		25	Iklim Kebhinekaan SMP	%	72,54	68,19	94,00
		26	Kemampuan Literasi SD	%	61,96	55,02	88,80
		27	Kemampuan Literasi SMP	%	72,67	72,01	99,09
		28	Kemampuan Numerasi SD	%	53,61	46,72	87,15
		29	Kemampuan Numerasi SMP	%	63,57	62,08	97,66
		30	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi Minimal D4/ S1	%	59,18	65,50	100,00
		31	Proporsi Jumlah Satuan PAUD	%	38,35	37,35	97,39



No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B				
2	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya	1	Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	%	100,00	100,00	100,00
		2	Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	%	96,55	100,00	100,00
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	Rasio	56,78	45,90	80,84
		2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	Rasio	53,46	40,07	74,95
		3	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	64,45	82,96	100,00



No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		4	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	63,99	93,02	100,00
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	%	100,00	100,00	100,00
5	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya	1.	Jumlah Ketua Adat yang Menerima Insentif	Orang	175	0	0
		2.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	6	9	100,00
		3.	Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah	Fasilitasi	11	30	100,00
		4.	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Benda/ Situs/ Kawasan	43	43	100,00
		5.	Terperliharnya Koleksi Benda Cagar Budaya	%	100,00	100,00	100,00

Indikator merupakan suatu konsep dan sekaligus ukuran. Sebagai suatu konsep, indikator merupakan besaran kuantitatif mengenai suatu

konsep tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur proses dan hasil pendidikan atau tampak dari suatu instrumen kebijakan pendidikan. Sebagai ukuran kuantitatif, indikator merupakan besaran dari suatu keadaan empiris dari suatu keadaan empiris dari suatu konsep atau gejala tertentu sebagai hasil pengolahan dari dua satuan data atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Indikator juga didefinisikan sebagai perbandingan antara dua atau lebih variabel sehingga dapat diinterpretasikan.

Indikator tidak dapat dipisahkan dari data bahkan saling bergabung satu sama lain. Indikator tidak mungkin dihasilkan tanpa dukungan data, sebaliknya data tidak memiliki acuan konseptual apapun tanpa dilakukannya definisi tentang indikator. Besaran indikator ini merupakan informasi yang berguna karena dapat dijadikan ukuran yang standar untuk menilai keberhasilan suatu program.

Angka partisipasi, sebagai salah satu indikator pendidikan penting diketahui. Dengan mengetahui angka partisipasi tersebut dapat dinilai apakah kegiatan tersebut disukai atau tidak disukai masyarakat. Semakin besar angka partisipasi suatu program pendidikan berarti program sukses dilaksanakan oleh lembaga disuatu daerah secara profesional. Sebaliknya jika kurang atau bahkan peserta banyak berhenti dalam proses pelaksanaan program berarti program tidak sukses dilaksanakan oleh lembaga. Berikut penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

3.1.1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mewakili dimensi Pendidikan. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan Pendidikan di Indonesia. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengenyam Pendidikan dan meningkatnya fasilitas Pendidikan merupakan faktor pendukung meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

Langkah-langkah perhitungan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah penduduk menurut umur usia 7 tahun ke atas (P_i)
2. Menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur usia 7 tahun ke atas (E_i)
3. Menghitung rasio penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut umur usia 7 tahun ke atas (E_i/P_i). Langkah ini menghasilkan partisipasi sekolah menurut umur.
4. Menjumlahkan harapan lama sekolah, yaitu dengan menjumlahkan semua partisipasi sekolah menurut umur (7 tahun ke atas) atau secara matematis rumus harapan lama sekolah dihitung menggunakan rumus:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Dimana:

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t = Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a+1, ..., n)

FK = Faktor Koreksi Pesantren

Misal Harapan Lama Sekolah adalah 12,90 berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang/harapan untuk menamatkan Pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

3.1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun keatas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir. Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun. Untuk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah

selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Angka RLS menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah maka semakin tinggi jenjang Pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia di suatu wilayah.

Langkah-langkah perhitungan rata-rata lama sekolah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan seleksi terhadap penduduk usia 25 tahun keatas
2. Mengelompokkan jenjang Pendidikan yang pernah/sedang diduduki
3. Mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki
4. Mengkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir

Ijazah Terakhir	Lama Sekolah (Tahun)
Tidak Punya Ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMLB/MA/SMK/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

5. Menghitung lamanya bersekolah

Rumus Rata-rata Lama Sekolah adalah sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Dimana :

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas
 Xi = Lama Sekolah penduduk ke-I yang berusia 25 tahun
 N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Misal Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah 9,43 berarti secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas pendidikannya telah mencapai 9,43 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas IX.

3.1.3 Guru yang memenuhi Kualifikasi D-IV /S1

Guru yang memenuhi Kualifikasi D-IV/S1 merupakan persentase antara jumlah guru yang menamatkan Pendidikan minimal D-IV/S1 dengan jumlah guru keseluruhan. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi D-IV/S1 di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Guru berijazah Kualifikasi S1/DIV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI+ SMP/MTs}} \times 100\%$$

3.1.4 Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD dan SMP

Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal ini jika berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu Kurikulum Pendidikan dasar dan menengah wajib memuat muatan lokal, jadi muatan lokal yang dimaksud ini sudah terimplementasi dengan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang masuk di dalam Buku Pembelajaran Tematik maka sekolah yang menerapkan yaitu 100%. Jika Persentase muatan lokal ini berdasarkan Sekolah yang memiliki buku/modul muatan lokal maka sekolah di Kabupaten Kutai Timur belum ada yang menerapkan. Hal ini terkendala karena belum adanya alokasi anggaran untuk Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal, Penyusunan Silabus Muatan Lokal dan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal, Untuk data yang di sajikan pada tabel diatas merupakan data sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal yang terimplementasi dengan Ekstrakurikuler. Adapun Rumus

untuk menghitung persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sekolah SD yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal}}{\text{Jumlah Sekolah SD}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Sekolah SMP yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal}}{\text{Jumlah Sekolah SMP}} \times 100\%$$

3.1.5 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD dan SMP

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD dan SMP adalah jumlah sekolah SD dan SMP yang di bandingkan dengan penduduk usia sekolah, penduduk usia sekolah SD 7-12 tahun dan penduduk usia sekolah SMP 13-15 tahun. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sekolah SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 s.d 12 Thn}} \times 10.000$$

$$\frac{\text{Jumlah Sekolah SMP/MTs}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 s.d 15 Thn}} \times 10.000$$

3.1.6 Angka Kelulusan (AL)

Persentase jumlah siswa tingkat tinggi yang lulus dari jenjang Pendidikan tertentu. Angka Kelulusan di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AL = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi SD dan SMP yang mengikuti ujian}} \times 100 \%$$

3.1.7 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Misalnya, anak usia 7 – 12 tahun yang merupakan usia sekolah dijenjang SD bersekolah dijenjang SD.

Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut atau dengan kata lain penduduk sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu.

Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Nilai ideal APM = 100 persen. Dimana nilai 100 persen akan tercapai apabila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Angka Partisipasi Murni dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 7–12 Tahun yang bersekolah di SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 –12 Thn}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 13–15 Tahun yang bersekolah di SMP/MTs}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 –15 Thn}} \times 100\%$$

3.1.8 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (PAUD, SD dan SMP) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Dari APK dapat menunjukkan tingkat partisipasi penduduk

secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena terdapat murid yang berusia diluar usia resmi sekolah. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. Oleh karena itu, perlu hati-hati dalam menafsirkan APK karena APK mengandung keluar masuknya anak-anak di atas atau dibawah usia sekolah yang bersangkutan. Angka partisipasi Kasar (APK) di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Siswa yang bersekolah di PAUD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 5 – 6 Thn}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Siswa yang bersekolah di SD/MI/PaketA}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Thn}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Siswa yang bersekolah di SMP/MTs/PaketB}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Thn}} \times 100\%$$

3.1.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan.

Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari

murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. Angka 100 persen akan tercapai apabila seluruh penduduk usia sekolah di suatu wilayah telah tertampung atau dapat bersekolah. Penduduk kelompok umur sekolah dapat dibedakan menjadi penduduk dengan umur 7-12 tahun dan penduduk dengan umur 13-15 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Thn}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Thn}} \times 100\%$$

3.1.10 Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Salah satu pendukung kelancaran proses belajar mengajar adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah kondisi ruang kelas yang digunakan untuk belajar. Dalam pembahasan berikut menampilkan tiga jenis kondisi ruang kelas, yaitu baik, rusak ringan, dan rusak berat. Disebut sebagai rusak berat jika mengalami kerusakan minimal 45-56 persen. Persentase Ruang Kelas kondisi bangunan baik bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Ruang Kelas dengan Kondisi Bangunan Baik SD/MI}}{\text{Jumlah Ruang Kelas Keseluruhan SD/MI}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Ruang Kelas dengan Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs}}{\text{Jumlah Ruang Kelas Keseluruhan SMP/MTs}} \times 100\%$$

3.1.11 Rasio Siswa per Guru (R-S/G)

Rasio siswa per guru (R-S/G) dapat didefinisikan merupakan perbandingan antar jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungan angka ini dapat digunakan untuk mengetahui rata-rata guru yang dapat melayani siswa disuatu sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Jika rasio siswa per guru ini tinggi, ini berarti

satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Banyaknya murid yang diajarkan/dilayani oleh seorang guru akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran. Rasio Siswa per Guru (R-S/G) dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$R-SG = \frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD/MI}}{\text{Jumlah guru pada jenjang pendidikan SD/MI}}$$

$$R-SG = \frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs}}{\text{Jumlah guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs}}$$

3.1.12 Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah (APtS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APtS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APtS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Angka Putus Sekolah (APtS) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$APtS = \frac{\text{Jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD}}{\text{Jumlah Siswa pada jenjang SD}} \times 100 \%$$

$$APtS = \frac{\text{Jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SMP}}{\text{Jumlah Siswa pada jenjang SMP}} \times 100 \%$$

3.1.13 Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) didefinisikan sebagai persentase jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka Melanjutkan (AM) berguna untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya serap sekolah yang lebih tinggi.



Angka Melanjutkan (AM) yang idealnya sebesar 100 persen. Angka Melanjutkan (AM) 100 persen berarti semua lulusan pada jenjang pendidikan tertentu dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian semakin tinggi Angka Melanjutkan (AM) dari suatu daerah semakin baik. Angka Melanjutkan (AM) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AM = \frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan yg lebih rendah pada tahun ajaran sebelumnya jenjang SD/MI}} \times 100\%$$

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

**TABEL 3.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN AJARAN 2023/2024 DAN 2024/2025**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja		Rasio Capaian	
		2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5/3*100)	(8=6/4*100)
1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,10	13,20	13,02	13,22	99,39	100,00
2	Angka Rata-rata lama sekolah (RLS)	9,45	9,55	9,47	9,48	100,21	99,27
3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	99,03	99,53	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	96,66	98,66	94,15	95,83	97,40	97,13



5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	64,84	66,84	84,86	88,32	100,00	100,00
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	69,57	72,57	94,37	95,35	100,00	100,00
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	103,71	105,71	105,67	105,64	100,00	100,00
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	79,37	81,37	106,65	107,12	100,00	100,00
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100,00	68,51	65,31	84,13	65,31	100,00
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	100,00	100,00	99,88	99,60	99,88	99,60
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	100,00	100,00	99,03	99,97	99,03	99,97
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	100,00	37,38	32,40	44,62	32,40	100,00
12	Rasio Murid/Guru (SD/MI)	20,00	20,00	15,92	15,66	79,60	78,30
13	Rasio Murid/Guru (SMP/MTs)	20,00	20,00	14,16	13,93	70,80	69,65
14	Angka Putus Sekolah (AptS) SD/MI	0,10	0,05	0,03	0,03	100,00	100,00



15	Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs	0,10	0,05	0,11	0,10	99,99	99,95
16	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	83,46	85,46	88,80	90,82	106,40	100,00
19	Iklim Inklusivitas SD	60,88	59,91	57,41	55,98	94,30	93,44
20	Iklim Inklusivitas SMP	62,71	60,27	57,87	60,45	92,28	100,00
21	Iklim Keamanan Sekolah SD	73,91	74,89	73,99	70,74	100,00	94,46
22	Iklim Keamanan Sekolah SMP	73,96	72,55	71,05	70,93	96,07	97,77
23	Iklim Kebhinekaan SD	73,91	73,60	72,60	65,44	99,58	88,91
24	Iklim Kebhinekaan SMP	71,84	72,54	71,54	68,19	99,58	94,00
25	Kemampuan Literasi SD	56,75	61,96	59,45	55,02	100,00	88,80
26	Kemampuan Literasi SMP	70,64	72,67	71,57	72,01	100,00	99,09
27	Kemampuan Numerasi SD	40,46	53,61	50,71	46,72	100,00	87,15
28	Kemampuan Numerasi SMP	66,79	63,57	72,85	62,50	100,00	100,00
29	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi Minimal D4/ S1	58,74	59,18	55,41	65,50	94,33	100,00



30	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	64,83	38,35	34,74	37,35	53,59	97,39
31	Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	95,40	96,55	100,00	100,00	100,00	100,00
33	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD/MI)	56,68	56,78	45,96	45,90	81,09	80,84
34	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP/MTs)	53,36	53,46	43,13	40,07	80,83	74,95
35	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	61,45	64,45	98,25	82,96	100,00	100,00
36	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	60,99	63,99	95,37	93,02	156,37	100,00
37	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



	Kepala Dinas Pendidikan						
38	Jumlah Ketua Adat yang Menerima Insentif	150	175	0	0	0	0
39	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	6	6	7	9	100,00	100,00
40	Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah	10	11	25	30	450,00	100,00
41	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	43	43	43	43	100,00	100,00
42	Terperliharnya Koleksi Benda Cagar Budaya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Program

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat**1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			
			Targ et	Realisa si	Persenta se Capaian	Kategor i
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	99,39	13,20	13,22	100,00	ST
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	100,21	9,55	9,48	99,27	ST

Dalam sasaran ini target indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,20 tahun dan realisasi sebesar 13,22 tahun menghasilkan persentase capaian pada tahun 2025 sebesar 100,00%.



Persentase capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2024, yaitu sebesar 99,39%. Dari hasil tersebut Angka Harapan Lama Sekolah, masuk dalam kategori sangat tinggi.

Indikator kedua adalah angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan target indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 9,55 tahun dan realisasi sebesar 9,48 tahun menghasilkan persentase capaian pada tahun 2025 sebesar 99,27%. Persentase ini menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2024, yaitu 100,21%. Dari hasil tersebut Angka Rata-Rata Lama Sekolah, termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Peningkatan Kualifikasi Guru (D4/S1/S2)	%	100,00	99,53	100,00	100,00	ST

Dalam sasaran ini target indikator Peningkatan kualifikasi guru (D4/S1/S2) sebesar 99,53% dan realisasi sebesar 100,00% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 sebesar 100,00%. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2024. Dari hasil tersebut peningkatan kualifikasi guru (D4/S1/S2) dalam kategori sangat tinggi.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
APM SD/MI	%	97,40	98,66	95,83	97,13	ST
APM SMP/MTs	%	100,00	66,84	88,32	100,00	ST



Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2025 dengan target 98,66% dan realisasi 95,83% maka diperoleh persentase capaian sebesar 97,13%. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 97,40%. Dengan Pencapaian tersebut Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI dalam kategori sangat tinggi.

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2025 dengan target 66,84% dan realisasi 88,32% maka diperoleh persentase capaian sebesar 100,00%. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2024. Dengan Pencapaian tersebut maka Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMP/MTs masuk dalam kategori sangat tinggi

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	100,00	72,57	95,35	100,00	ST
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100,00	105,71	105,64	100,00	ST
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	100,00	81,37	107,12	100,00	ST

Dalam sasaran ini target indikator angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 72,57% dan realisasi sebesar 95,35% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 sebesar 100,00%. Capaian ini sama dengan tahun 2024. Dari hasil tersebut Angka Partisipasi



Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masuk dalam kategori sangat tinggi.

Dalam sasaran ini target indikator angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A sebesar 105,71% dan realisasi sebesar 105,64% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 sebesar 100,00%. Capaian ini sama dengan tahun 2024. Dari hasil tersebut Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A masuk dalam kategori sangat tinggi.

Dalam sasaran ini target indikator angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B sebesar 81,37% dan realisasi sebesar 107,12% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 sebesar 100,00%. Capaian ini sama dengan tahun 2024. Dari hasil tersebut Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B masuk dalam kategori sangat tinggi.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	65,31	68,51	84,13	100,00	ST
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	%	99,88	100,00	99,88	99,88	ST
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	%	99,03	100,00	99,03	99,03	ST
Angka Partisipasi	%	32,40	37,38	44,62	100,00	ST



Sekolah (APS) 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan						
---	--	--	--	--	--	--

Dalam sasaran ini target indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-12 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 68,51% dan realisasi sebesar 84,13% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 sebesar 100,00%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 65,31%. Dari hasil tersebut Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-12 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masuk dalam kategori sangat tinggi.

Dalam sasaran ini target indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 99,60% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 sebesar 99,60%. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 99,88%. Dari hasil tersebut Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 masuk dalam kategori sangat tinggi.

Dalam sasaran ini target indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 99,97% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 sebesar 99,97%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 99,03%. Dari hasil tersebut Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 masuk dalam kategori sangat tinggi.

Dalam sasaran ini target indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan sebesar 37,38% dan realisasi sebesar 44,62% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 sebesar 100,00%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 32,40%. Dari hasil tersebut Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan masuk dalam kategori sangat tinggi.

			Tahun 2025
--	--	--	-------------------



Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Rasio Murid/Guru (SD/MI)	%	79,60	20,00	15,66	78,30	B
Rasio Murid/Guru (SMP/MTs)	%	70,80	20,00	13,93	69,65	C

Dalam sasaran ini target indikator Rasio Murid/Guru (SD/MI) sebesar 20,00% dan realisasi sebesar 15,66% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 sebesar 78,30%. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 79,60%. Dari hasil tersebut Rasio Murid/Guru (SD/MI) masuk dalam kategori tinggi.

Dalam sasaran ini target indikator Rasio Murid/Guru (SMP/MTs) sebesar 20,00% dan realisasi sebesar 13,93% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 sebesar 69,65%. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 70,80%. Dari hasil tersebut Rasio Murid/Guru (SMP/MTs) masuk dalam kategori sedang.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Angka Putus Sekolah (APTs) SD/MI	%	100,00	0,05	0,03	100,00	ST
Angka Putus Sekolah (APTs) SMP/MTs	%	99,99	0,05	0,10	99,95	ST



Indikator Angka Putus Sekolah (APTs) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2025 dengan target 0,05% dan realisasi 0,03% maka menghasilkan persentase capaian sebesar 100,00%. Capaian ini sama dengan tahun 2024. Dengan Pencapaian tersebut Angka Putus Sekolah (APTs) untuk jenjang SD/MI masih mencapai target yang diinginkan dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

Indikator Angka Putus Sekolah (APTs) untuk jenjang SMP/MTS pada tahun 2025 dengan target 0,05% dan realisasi 0,10% maka diperoleh persentase capaian sebesar 99,95%. Capaian tahun 2025 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 99,99%. Dengan Pencapaian tersebut Angka Putus Sekolah (APTs) untuk jenjang SMP/MTS termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			
			Targ et	Realisa si	Persenta se Capaian	Kategor i
Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	106,40	85,46	90,82	100,00	ST

Indikator Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2025 dengan target 85,46% dan realisasi 90,82% maka menghasilkan persentase capaian sebesar 100,00%. Persentase capaian tahun 2025 meningkat jika dibandingkan persentase capaian tahun 2024. Dengan Pencapaian tersebut Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs masuk dalam kategori sangat tinggi.

			Tahun 2025
--	--	--	------------



Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	ST
Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	%	100,00	95,40	100,00	100,00	ST

Dalam sasaran ini target indikator Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 100,00% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 sebesar 100,00%. Capaian ini sama dengan tahun 2024. Dari hasil tersebut Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD masuk dalam kategori sangat tinggi.

Dalam sasaran ini target indikator Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP sebesar 96,55% dan realisasi sebesar 100,00% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 sebesar 100,00%. Capaian ini sama dengan tahun 2024. Dari hasil tersebut Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP masuk dalam kategori sangat tinggi.

			Tahun 2025
--	--	--	-------------------



Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD/MI)	%	81,09	56,78	45,90	80,84	T
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP/MTs)	%	80,83	53,46	40,07	74,95	S
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	100,00	64,45	82,96	100,00	ST
Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	156,37	63,99	93,02	100,00	ST

Dalam sasaran ini target indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (SD/MI) sebesar 56,78% dan realisasi sebesar 45,90% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 sebesar 80,84%. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 81,09%. Dari hasil tersebut Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (SD/MI) masuk dalam kategori tinggi.

Dalam sasaran ini target indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (SMP/MTs) sebesar 53,46% dan realisasi sebesar

40,07% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 sebesar 74,95%. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 80,83%. Dari hasil tersebut Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (SMP/MTs) masih dalam kategori sedang.

Indikator Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik pada tahun 2025 dengan target 64,45% dan realisasi 82,96% maka menghasilkan persentase capaian sebesar 100,00%. Persentase capaian tahun 2025 sama dengan persentase capaian tahun 2024. Dengan Pencapaian tersebut Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik masuk dalam kategori sangat tinggi.

Indikator Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik pada tahun 2025 dengan target 63,99% dan realisasi 93,02% maka menghasilkan persentase capaian sebesar 100,00%. Persentase capaian tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024. Dengan Pencapaian tersebut Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik masuk dalam kategori sangat tinggi.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2024	2025
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,22	13,02	0,2
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,48	9,47	0,01

Dalam sasaran ini indikator Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 realisasi meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Persentase kenaikan realisasi tersebut meningkat sebesar 0,2 tahun dibandingkan tahun 2024.

Dalam sasaran ini indikator Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2025 realisasi meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.



Persentase kenaikan realisasi tersebut meningkat sebesar 0,01 tahun dibandingkan tahun 2024.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2024	2025
1	Peningkatan Kualifikasi Guru (D4/S1/S2)	%	100,00	100,00	0

Dalam sasaran ini indikator Peningkatan kualifikasi guru (D4/S1/S2) pada tahun 2025 realisasi sama dengan realisasi tahun 2024.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2024	2025
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	95,83	94,15	1,68
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	88,32	84,86	3,46

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2025 realisasi meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Persentase penurunan realisasi tersebut menurun sebesar 1,68 dibandingkan tahun 2024.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs pada tahun 2025 realisasi meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Persentase kenaikan realisasi tersebut meningkat sebesar 3,46 tahun dibandingkan tahun 2024.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2024	2025
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	94,37	95,35	-0,98
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	105,64	105,67	-0,03
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	107,12	106,65	0,47

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2025 realisasi menurun 0,98% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Realisasi tahun 2025 sebesar 94,37% dan realisasi tahun 2024 sebesar 95,35%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A pada tahun 2025 realisasi menurun 0,03% dibandingkan



dengan realisasi tahun 2024. Realisasi tahun 2025 sebesar 105,64% dan realisasi tahun 2024 sebesar 105,67%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B pada tahun 2025 realisasi meningkat 0,47% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Realisasi tahun 2025 sebesar 107,12% dan realisasi tahun 2024 sebesar 106,65%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2024	2025
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	65,31	84,13	-18,82
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	%	99,60	99,88	-0,28
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	%	99,97	99,03	0,94
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18	%	44,62	32,40	12,22



	Tahun Pendidikan Kesetaraan				
--	-----------------------------	--	--	--	--

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2025 realisasi menurun 18,82% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Realisasi tahun 2025 sebesar 65,31% dan realisasi tahun 2024 sebesar 84,13%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 pada tahun 2025 realisasi menurun 0,28% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Realisasi tahun 2025 sebesar 99,60% dan realisasi tahun 2024 sebesar 99,88%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 pada tahun 2025 realisasi meningkat 0,94% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Realisasi tahun 2025 sebesar 99,97% dan realisasi tahun 2024 sebesar 99,03%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 pada tahun 2025 realisasi meningkat 12,22% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Realisasi tahun 2025 sebesar 44,62% dan realisasi tahun 2024 sebesar 32,40%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2024	2025
1	Rasio Murid/Guru (SD/MI)		15,66	15,92	0,26
2	Rasio Murid/Guru (SMP/MTs)		13,93	14,16	-0,23



Dalam sasaran ini indikator Rasio Murid/ Guru (SD/MI) pada tahun 2025 realisasi meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Persentase realisasi tersebut meningkat sebesar 0,26 dibandingkan tahun 2024.

Dalam sasaran ini indikator Rasio Murid/ Guru (SMP/MTs) pada tahun 2025 realisasi menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Persentase realisasi tersebut menurun sebesar 0,23 dibandingkan tahun 2024.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2024	2025
1	Angka Putus Sekolah (AptS) SD/MI	%	0,03	0,03	0,00
2	Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs	%	0,10	0,11	-0,01

Dalam sasaran ini indikator Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI pada tahun 2025 persentase realisasi sama dengan tahun 2024 sebesar 0,00%.

Untuk indikator Angka Putus Sekolah untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2025 persentase realisasi menurun dibandingkan realisasi tahun 2024. Persentase realisasi tersebut menurun sebesar 0,01 dibandingkan tahun 2024.



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2024	2025
1	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	90,82	88,80	2,02

Dalam sasaran ini indikator Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2025 realisasi capaiannya meningkat sebesar 2,02% jika dibandingkan tahun 2024. Realisasi tahun 2024 sebesar 90,82% dan realisasi tahun 2024 sebesar 88,80%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2024	2025
1	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	%	100,00	100,00	0
2	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	%	100,00	100,00	0



Dalam sasaran ini indikator Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD pada tahun 2025 realisasi sama dengan realisasi tahun 2024.

Dalam sasaran ini indikator Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP pada tahun 2025 realisasi sama dengan realisasi tahun 2024.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2024	2025
1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD/MI)		45,90	45,96	-0,06
2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP/MTs)		40,07	43,13	-3,06
3	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	82,96	98,25	-15,29
4	Sekolah Pendidikan	%	93,02	95,37	-2,35



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2024	2025
	SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik				

Dalam sasaran ini indikator Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD/MI) pada tahun 2025 realisasi capaiannya menurun sebesar 0,06% jika dibandingkan tahun 2024. Realisasi tahun 2025 sebesar 45,90% dan realisasi tahun 2024 sebesar 45,96%.

Dalam sasaran ini indikator Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP/MTs) pada tahun 2025 realisasi capaiannya menurun sebesar 3,06% jika dibandingkan tahun 2024. Realisasi tahun 2025 sebesar 40,07% dan realisasi tahun 2024 sebesar 43,13%.

Dalam sasaran ini indikator Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik pada tahun 2025 realisasi capaiannya menurun sebesar 15,29% jika dibandingkan tahun 2024. Realisasi tahun 2025 sebesar 82,96% dan realisasi tahun 2024 sebesar 98,25%.

Dalam sasaran ini indikator Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik pada tahun 2025 realisasi capaiannya menurun sebesar 2,35% jika dibandingkan tahun 2024. Realisasi tahun 2025 sebesar 93,02% dan realisasi tahun 2024 sebesar 95,37%.



3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2025	2026	2025	2026
1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,22	13,20	13,30	100	97,90
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,48	9,55	10,00	99,27	94,70

Dalam sasaran ini indikator Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 realisasi sebesar 13,22 tahun jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 diperoleh capaian sebesar 100%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 97,90%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2025 realisasi sebesar 9,48 tahun jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 diperoleh capaian sebesar 99,27%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 94,70%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2025	2026	2025	2026
1	Peningkatan Kualifikasi Guru (D4/S1/S2)	%	100,00	99,53	100,00	100,00	100,00

Dalam sasaran ini indikator Peningkatan kualifikasi guru (D4/S1/S2) pada tahun 2025 realisasi sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 99,53%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 100,00%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2025	2026	2025	2026
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	95,83	98,66	100,00	97,13	94,15
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	88,32	66,84	70,00	100,00	121,23

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD/MI pada tahun 2025 realisasi sebesar 95,83% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 diperoleh capaian sebesar 97,13%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 94,15%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2025 realisasi sebesar 88,32% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 100%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 121,23%.



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2025	2026	2025	2026
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	95,35	72,57	75,57	100,00	124,88
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	105,64	105,71	107,71	100,00	98,11
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	107,12	81,37	83,37	100,00	127,92

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2025 realisasi sebesar 95,35% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 100 %, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 124,88%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A pada tahun 2025 realisasi sebesar 105,64% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 100%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 98,11%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B pada tahun 2025 realisasi sebesar 107,12% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 100%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 127,92%.



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2025	2026	2025	2026
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	%	99,60	100,00	100,00	99,60	99,88
2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15`	%	99,97	100,00	100,00	99,97	99,03

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 pada tahun 2025 realisasi sebesar 99,60% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 99,60%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 99,88%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) (13-15) pada tahun 2025 realisasi sebesar 99,97% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 99,97%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 99,03%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2025	2026	2025	2026
1	Rasio Murid/Guru (SD/MI)	%	15,66	20,00	20,00	78,30	79,60
2.	Rasio Murid/Guru (SMP/MTs)	%	13,93	20,00	20,00	69,65	70,80

Dalam sasaran ini indikator Rasio Murid/Guru (SD/MI) pada tahun 2025 realisasi sebesar 15,66% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 78,30%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 79,60%.

Dalam sasaran ini indikator Rasio Murid/Guru (SMP/MTs) pada tahun 2025 realisasi sebesar 13,93% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 69,65%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 70,80%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2025	2026	2025	2026
1	APTs SD/MI	%	0,03	0,05	0,00	100,00	99,82
2	APTs SMP/MTs	%	0,10	0,05	0,00	99,95	99,72

Dalam sasaran ini indikator Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI pada tahun 2025 realisasi sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 100%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 99,82%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Putus Sekolah untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2025 realisasi sebesar 0,10% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 99,95%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 99,72%.



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2025	2026	2025	2026
1	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	90,82	85,46	87,46	100,00	100,00

Dalam sasaran ini indikator Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2025 realisasi sebesar % jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 diperoleh capaian sebesar %, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 101,53%. Nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur khususnya Dinas Pendidikan harus terus berupaya untuk mencapai target pada tahun 2026 dan harus mempertahankan pencapaian tersebut dengan realisasi yang konstan atau meningkat untuk tahun mendatang.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2025	2026	2025	2026
1	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Sekolah	%	100,00	96,55	100,00	100,00	100,00



yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP							
--	--	--	--	--	--	--	--

Dalam sasaran ini indikator Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD pada tahun 2025 realisasi sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 100,00%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 100,00 %.

Dalam sasaran ini indikator Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP pada tahun 2025 realisasi sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 100,00%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 100,00%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2025	2026	2025	2026
1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD/MI)	%	45,90	56,78	56,88	80,84	80,80
2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP/MTs)	%	40,07	53,46	53,56	74,95	80,53

Dalam sasaran ini indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (SD/MI) pada tahun 2025 realisasi sebesar 45,90% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 80,84%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 80,80%.

Dalam sasaran ini indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (SMP/MTs) pada tahun 2025 realisasi sebesar 40,07% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 74,95%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 80,53%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2025	2026	2025	2026
1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	82,96	64,45	67,45	100,00	145,66
2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	93,02	63,99	66,99	100,00	141,86

Dalam sasaran ini indikator Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik pada tahun 2025 realisasi sebesar 82,96% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 memperoleh capaian

sebesar 100,00%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 145,66 %.

Dalam sasaran ini indikator Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik pada tahun 2025 realisasi sebesar 93,02% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 155,81%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 100,00%.

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	Tahun	99,60	99,21	100,39
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	Tahun	99,97	96,20	103,92

Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun 2025 persentase capaian sebesar 100,39% dan realisasi tahun 2025 sebesar 99,60%, nilai ini sudah melebihi Standar nasional yaitu sebesar 99,21%.

Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun 2025 persentase capaian sebesar 103,92% dan realisasi tahun 2025 sebesar 99,97%, nilai ini sudah melebihi Standar nasional yaitu sebesar 96,20%.

5) Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2025 sebesar 13,22 tahun. Hal ini berarti penduduk di Kabupaten Kutai Timur yang berusia 7 tahun memiliki harapan untuk bersekolah hingga Diploma I. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) ini meningkat 0,20 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 13,02 tahun.

Capaian kinerja Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2025 sebesar 9,48 tahun. Hal ini berarti penduduk di Kabupaten Kutai Timur yang berusia 25 tahun keatas rata-rata telah menempuh Pendidikan hingga kelas X atau kelas 1 SMA semester 1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ini meningkat 0,01 tahun jika dibandingkan dengan RLS tahun 2025 sebesar 9,47 tahun.

Untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ini sangat dibutuhkan sosialisasi pendidikan mengenai pentingnya wajib belajar minimal 12 tahun kepada penduduk di Kabupaten Kutai Timur. Diharapkan dari kegiatan sosialisasi Pendidikan ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wajib belajar minimal 12 tahun. Selain itu dari segi infrastruktur peningkatan sarana prasarana Pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap meningkatnya angka HLS dan RLS karena sarana dan prasarana pendidikan yang baik akan membuat warga sekolah seperti pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik merasa lebih nyaman, lebih aman dan lebih bersemangat dalam mengenyam Pendidikan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kualitas pendidik yang lebih inovatif, kreatif dan professional sehingga membuat peserta didik lebih semangat dalam memperoleh pelajaran dan dapat menciptakan peserta didik yang unggul, berkualitas serta mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dihitung berdasarkan data siswa SD usia 7-12 tahun di bandingkan dengan data penduduk usia 7-12 tahun, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan data siswa keseluruhan SD/MI dibandingkan dengan data penduduk usia 7-12 tahun. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI tahun 2025 sebesar 95,83%, nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 94,15%. Nilai APK tahun 2025 sebesar 105,64%, nilai ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 105,67%. Untuk Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun jenjang Pendidikan dasar tahun 2025 sebesar 99,60% nilai ini menurun dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 99,88%. Dari data diatas dapat diketahui bahwa siswa SD yang bersekolah usia 7-12 tahun hanya sekitar 99,60% dari total penduduk usia 7-12 tahun.

Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dihitung berdasarkan data siswa SMP/MTs usia 13-15 tahun di bandingkan dengan data penduduk usia 13-15 tahun, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan data siswa keseluruhan SMP dibandingkan dengan data penduduk usia 13-15 tahun. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS tahun 2025 sebesar 88,32%, nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 84,86%. Nilai APK tahun 2025 sebesar 107,12%, nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 106,65%. Untuk Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 tahun jenjang Pendidikan SMP tahun 2025 sebesar 99,97% nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 99,03%.

Maka solusinya adalah pihak yang berwenang mengurus masalah ini (Sekolah dan Dinas Pendidikan) harus lebih selektif dalam memilih siswa baru agar dapat sesuai dengan standar usia sekolah perjenjang pendidikan yang telah ditetapkan. Sehingga dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dikemudian hari dapat di minimalisir, seperti kejenuhan belajar untuk murid tingkat Pendidikan Dasar.

Persentase guru SD yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1 tahun 2025 sebesar 100,00%, nilai ini sama dengan tahun 2024.

Permasalahan yang dihadapi yaitu masih banyaknya fasilitas Pendidikan yang belum memadai di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, mulai dari Bangunan gedung yang kurang layak sampai sarana penunjang pendidikan yang masih minim. Maka diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk bisa lebih fokus terhadap pendanaan

pendidikan khususnya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sarana prasarana Pendidikan yang ada di 18 Kecamatan Kabupaten Kutai Timur.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	100,00	94,73	1,06

Adapun sasaran meningkatnya taraf pendidikan masyarakat dengan capaian 100,00% dan penyerapan anggaran 94,73% menghasilkan tingkat efisiensi yang sangat Tinggi sebesar 1.06.

7) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk sasaran Tercapainya peningkatan taraf Pendidikan masyarakat program yang menunjang berdasarkan Kepmendagri 050 adalah program pengelolaan Pendidikan dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan :

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
5. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Pengembangan Kurikulum
7. Program Pengembangan Kebudayaan
8. Program Pengembangan Kesenian Tradisional



9. Program Pembinaan Sejarah
10. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
11. Program Pengelolaan Permuseuman

2) Analisis Capaian Kinerja

TABEL 3.4
RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH PER PENDUDUK USIA
SEKOLAH
TAHUN 2024 DAN 2025

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun	
		2024	2025
1	SD/MI		
	Jumlah SD	238	240
	Jumlah MI	10	11
	Jumlah SD/MI	248	251
	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun (Capil)	53.965	54.683
	Rasio Per 10.000 (Capil)	45,96	45,90
	Rasio Ideal per 10.000	52,00	52,00
2	SMP/MTS		
	Jumlah SMP	95	94
	Jumlah MTS	17	16
	Jumlah SMP/MTS	112	110
	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun (Capil)	25.969	27.450
	Rasio Per 10.000 (Capil)	43,13	40,07
	Rasio Ideal per 10.000	52,00	52,00

Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI jika dibandingkan dengan penduduk usia sekolah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil)

tahun 2025 sebesar 45,90 per 10.000 penduduk, nilai ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 45,96 per 10.000 penduduk. Nilai ini belum termasuk dalam rasio ideal per 10.000 penduduk yaitu 52,00.

Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTS jika dibandingkan dengan penduduk usia sekolah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) tahun 2025 sebesar 40,07 per 10.000 penduduk, nilai ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 43,13 per 10.000 penduduk. Nilai ini belum termasuk dalam rasio ideal per 10.000 penduduk yaitu 52,00.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Sekolah di Kabupaten Kutai Timur untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTS masih dibawah jumlah ideal untuk menampung penduduk yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

3) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	77,90	93,95	0,83

Adapun sasaran Tercapainya Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dengan capaian 77,90% dan penyerapan anggaran 93,95% maka mempunyai tingkat efisiensi sebesar 0,83. Anggaran untuk meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan bersumber dari Dana APBD dan APBN (DAK Fisik Reguler).

4) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk sasaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan, capaian ini merupakan kinerja dari Program Pengelolaan Pendidikan dengan



kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Dengan Sub Kegiatan :

1. Penambahan Ruang Kelas Baru
2. Pembangunan Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU
3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
4. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
5. Pembangunan Laboratorium
6. Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula
7. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
8. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
9. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
10. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah/ TU
11. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
12. Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah
13. Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium
14. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
15. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga Sekolah
16. Pengadaan Mebel Sekolah
17. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
18. Pengadaan Perlengkapan Siswa
19. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
20. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
21. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
22. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
23. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
24. Pengelolaan Dana BOS
25. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS



3.3 TABEL RINCIAN PENCAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025

TABEL 3.5
GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI D-IV/S1 JENJANG SD/MI
TAHUN AJARAN 2025/2026

No	Kecamatan	Jumlah Guru	
		Guru Pendidikan $\geq$ S1	Jumlah Guru Keseluruhan
1	Muara Ancalong	157	157
2	Busang	65	65
3	Long Mesangat	70	70
4	Muara Wahau	305	305
5	Telen	106	106
6	Kongbeng	231	231
7	Muara bengkal	121	121
8	Batu Ampar	72	72
9	Sangatta Utara	943	943
10	Bengalon	385	385
11	Teluk Pandan	119	119
12	Sangatta Selatan	223	223
13	Rantau Pulung	109	109
14	Sangkulirang	222	222
15	Kaliorang	135	135
16	Sandaran	138	138
17	Kaubun	148	148
18	Karangan	122	122
Kabupaten Kutai Timur		3.671	3.671



TABEL 3.6
GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI D-IV/S1 JENJANG SMP/MTs
TAHUN AJARAN 2025/2026

No	Kecamatan	Jumlah Guru	
		Guru Pendidikan $\geq$ S1	Jumlah Guru Keseluruhan
1	Muara Ancalong	88	88
2	Busang	19	19
3	Long Mesangat	33	33
4	Muara Wahau	142	142
5	Telen	41	41
6	Kongbeng	100	100
7	Muara bengkal	55	55
8	Batu Ampar	21	21
9	Sangatta Utara	412	412
10	Bengalon	125	125
11	Teluk Pandan	59	59
12	Sangatta Selatan	110	110
13	Rantau Pulung	38	38
14	Sangkulirang	83	83
15	Kaliorang	53	53
16	Sandaran	55	55
17	Kaubun	78	78
18	Karangan	36	36
Kabupaten Kutai Timur		1.548	1.548



TABEL 3.7
JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH DASAR (SD) PER KECAMATAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	
		Jumlah Siswa Putus Sekolah	Jumlah Murid
1	Muara Ancalong	1	1.864
2	Busang	1	790
3	Long Mesangat	1	905
4	Muara Wahau	2	4.798
5	Telen	1	1.765
6	Kongbeng	2	3.953
7	Muara Bengkal	1	1.770
8	Batu Ampar	0	876
9	Sangatta Utara	0	14.927
10	Bengalon	1	5.939
11	Teluk Pandan	2	1.595
12	Sangatta Selatan	0	3.257
13	Rantau Pulung	0	1.696
14	Sangkulirang	0	3.479
15	Kaliorang	1	2.284
16	Sandaran	0	2.167
17	Kaubun	1	2.476
18	Karangan	2	2.027
Kabupaten Kutai Timur		16	56.568

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur



TABEL 3.8
JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PER
KECAMATAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	
		Jumlah Siswa Putus Sekolah	Jumlah Murid
1	Muara Ancalong	0	859
2	Busang	0	243
3	Long Mesangat	0	375
4	Muara Wahau	2	1.694
5	Telen	2	484
6	Kongbeng	1	1.591
7	Muara bengkal	0	662
8	Batu Ampar	0	224
9	Sangatta Utara	2	6.179
10	Bengalon	2	1.646
11	Teluk Pandan	3	785
12	Sangatta Selatan	0	1.469
13	Rantau Pulung	0	591
14	Sangkulirang	2	1.116
15	Kaliorang	2	733
16	Sandaran	1	714
17	Kaubun	3	887
18	Karangan	0	625
Kabupaten Kutai Timur		20	20.877

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur



TABEL 3.9
ANGKA KELULUSAN SD/MI PER KECAMATAN TAHUN AJARAN
2025/2026

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	
		Jumlah Peserta	Jumlah Siswa Lulus
1	Muara Ancalong	335	335
2	Busang	86	86
3	Long Mesangat	129	129
4	Muara Wahau	631	631
5	Telen	256	256
6	Kongbeng	564	564
7	Muara bengkal	309	309
8	Batu Ampar	125	125
9	Sangatta Utara	2.533	2.533
10	Bengalon	824	824
11	Teluk Pandan	221	221
12	Sangatta Selatan	516	516
13	Rantau Pulung	238	238
14	Sangkulirang	532	532
15	Kaliorang	361	361
16	Sandaran	323	323
17	Kaubun	360	360
18	Karangan	252	252
Kabupaten Kutai Timur		8.595	8.595

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur



TABEL 3.10
ANGKA KELULUSAN SMP/MTs PER KECAMATAN TAHUN AJARAN
2025/2026

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	
		Jumlah Peserta	Jumlah Siswa Lulus
1	Muara Ancalong	137	137
2	Busang	76	76
3	Long Mesangat	76	76
4	Muara Wahau	439	439
5	Telen	155	155
6	Kongbeng	404	404
7	Muara bengkal	203	203
8	Batu Ampar	62	62
9	Sanggatta Utara	1.971	1.971
10	Bengalon	521	521
11	Teluk Pandan	219	219
12	Sanggatta Selatan	331	331
13	Rantau Pulung	183	183
14	Sangkulirang	325	325
15	Kaliorang	207	207
16	Sandaran	214	214
17	Kaubun	242	242
18	Karangan	177	177
Kabupaten Kutai Timur		5.942	5.942

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur



TABEL 3.11
SEKOLAH PENDIDIKAN KONDISI BANGUNAN BAIK
TAHUN AJARAN 2025/2026

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun
		2025
1	Jumlah Kelas Baik	
1.1	SD/MI	2.030
	SMP/MTS	746
	Jumlah Seluruh Kelas	
	SD/MI	2.447
	SMP/MTS	802
	Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik	
	SD/MI	82,96
	SMP/MTS	93,02

TABEL 3.12
RASIO GURU DAN MURID PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2025

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun
		2025
1	JUMLAH SISWA SD/MI	
1.1	SD	55.347
1.2	MI	2.127
1.3	Jumlah Siswa SD/MI	
2	JUMLAH GURU SD/MI	
2.1	SD	3.476
2.2	MI	195
2.3	Jumlah Guru SD/MI	3.671
	Rasio Siswa/Guru SD	15,66
3		
3.1	SMP	19.858
3.2	MTS	1.712
3.3	Jumlah Siswa SMP/MTS	
4	JUMLAH GURU SMP/MTS	
4.1	SMP	1.333
4.2	MTS	215
4.3	Jumlah Guru SMP/MTS	1.548
	Rasio Siswa/Guru SMP	13,93

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun Ajaran 2025/2026

TABEL 3.13

ANGKA PARTISIPASI MURNI TAHUN AJARAN 2025/2026

PENDUDUK MENURUT USIA (DATA CAPIL)		JUMLAH SISWA		APM	
7-12 Tahun	13-15 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun
54.683	27.450	52.400	24.245	95,83	88,32

TABEL 3.14

ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN AJARAN 2025/2026

PENDUDUK MENURUT USIA (DATA CAPIL)		JUMLAH SISWA		APK	
7-12 Tahun	13-15 Tahun	Jumlah Keseluruhan SD/MI/Paket A	Jumlah Keseluruhan SMP/MTs/Paket B	SD/MI	SMP/MTs
54.683	27.450	57.765	29.405	105,64	107,12

3.4 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **2.032.366.418.142,-** (Dua Triliun Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah) sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. **1.975.052.522.092,80,-** (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Sen) atau sebesar **97,18%**. Dengan rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. **888.720.976.412,-** (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. **860.328.416.812,-** (Delapan Ratus Enam Puluh Miliar



Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) dengan nilai pencapaian sebesar **96,81%**, dan Belanja BOS Reguler, Afirmasi dan Kinerja SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp. **95.704.740.755,-** (*Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), untuk dana BOS ini langsung disalurkan pusat ke Sekolah-sekolah di Kabupaten Kutai Timur sebagai Bantuan Operasional Sekolah, adapun sisa dana pada anggaran BOS tidak masuk ke dalam Kas daerah melainkan tetap pada kas sekolah untuk dibelanjakan pada tahun selanjutnya. Untuk belanja Dana DAK fisik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. **2.375.569.000,-** (*Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. **2.370.983.671,-** (*Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) dengan nilai pencapaian sebesar **99,81%**. Adapun rincian dari realisasi keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai beriku



TABEL 3.15
ANGGARAN PERSASARAN

KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN		PAGU	REALISASI		SISA DANA
			(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
	T O T A L		2.032.366.418.142,00	1.975.052.522.092,88	97,18	57.313.896.049.20
1:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		935.404.121.919,00	4.590.322.063,00	96.6	31.797.641.319,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.872.411.691,00	4.590.322.063,00	78.17	1.282.089.628,00
1.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.191.600,00	40.191.600,00	100,00	0
1.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.644.800,00	4.644.800,00	100,00	0
1.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.827.575.291,00	4.545.485.663,00	78,00	1.282.089.628,00
01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		889.720.976.412,00	861.252.306.553,00	96,8	28.468.669.859,00
01.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	888,720,976,412.00	860,328,416,812.00	96.81	28.392.559.600,00
01.01.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,000,000,000.00	923,889,741.00	92.39	76.110.259,00



1.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	716.404.764,00	670463240,00	93,59	45.941.524,00
1.01.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	300,000,000.00	295,556,000.00	98.52	4.444.000,00
1.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.996.801.293,00	11.726.144.764,00	90.22	1.270.656.529,00
1.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2,119,678,000.00	1,406,417,850.00	66.35	713.260.150,00
1.01.01.2.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,089,306,368.00	975,632,500.00	89.56	113.673.868,00
1.01.01.2.05.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	9,787,816,925.00	9,344,094,414.00	95.47	443.722.511,00
1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.507.063.629.00	3.316.123.120,00	94.56	190.940.509,00
1.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,119,678,000.00	1,406,417,850.00	66.35	713.260150,00
1.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,089,306,368.00	975,632,500.00	89.56	113.673.868,00
1.01.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,787,816,925.00	9,344,094,414.00	95.47	443.722.511,00
1.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	561776500,00	555895000,00	98.95	5.881.500,00
1.01.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	382,406,500.00	377,531,000.00	98.73	4.875.500,00
1.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	179,370,000.00	178,364,000.00	99.44	1.006.000,00



1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21,025,340,894,00	20,668,340,328,00	98.3	357,000,566,00
1.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	447,292,000.00	298,129,660.00	66.65	149,162,340,00
1.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135,650,000.00	14,520,000.00	10.7	121,130,000,00
1.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20,442,398,894.00	20,355,690,668.00	99.58	86,708,226,00
1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.419.751.500.00	1.201.792.772,00	84.65	217.958.728.00
1.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	567,061,500.00	419,188,772.00	73.92	147.872.728,00
1.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270,250,000.00	201,890,000.00	74.7	68.360.000,00
1.01.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	582,440,000.00	580,714,000.00	99.7	1.726.000,00
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.007.187.467.377,00	986.898.980.859,80	97.99	20.288.486.517,20
1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	378.064.379.577,00	370.987.485.482,80	98.13	7.076.894.094,20
1.01.02.2.01.03		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2,108,026,177.00	1,943,110,177.00	92.18	164.916.000,00
1.01.02.2.01.04		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	6,775,282,332.00	6,517,425,455.00	96.19	257.856.877,00



1.01.02.2.01.05		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,039,099,078.00	1,031,200,078.00	99.24	7.899.000,00
1.01.02.2.01.06		Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	26,209,602,754.00	25,926,196,230.00	98.92	283.406.524,00
1.01.02.2.01.07		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	3,231,769,385.00	3,080,874,385.80	95.33	150.894.999,20
1.01.02.2.01.08		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	737,683,000.00	722,143,000.00	97.89	15.540.000,00
1.01.02.2.01.11		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	179,403,000.00	179,403,000.00	100	0
1.01.02.2.01.13		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	664,546,100.00	664,546,100.00	100	0
1.01.02.2.01.16		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	77,856,380,000.00	77,126,341,001.00	99.06	730.038.999,00
1.01.02.2.01.17		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	373,226,800.00	248,226,800.00	66.51	125.000.000,00
1.01.02.2.01.25		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	750,000,000.00	744,982,400.00	99.33	5.017.600,00
1.01.02.2.01.28		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2,000,000,000.00	1,999,985,000.00	100	15.000,00
1.01.02.2.01.29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	58,055,968,000.00	57,969,581,140.00	99.85	86.386.860,00
1.01.02.2.01.39		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1,400,000,000.00	1,399,000,000.00	99.93	1.000.000,00
1.01.02.2.01.45		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	30,729,644,500.00	29,283,300,240.00	95.29	1.446.344.260,00
1.01.02.2.01.46		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	112,331,694,991.00	111,391,859,070.00	99.16	939.835.921,00



1.01.02.2.01.47		Pembangunan Ruang Kelas Baru	26,161,850,460.00	23,530,558,406.00	89.94	2.631.292.054,00
1.01.02.2.01.51		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3,644,461,000.00	3,415,443,000.00	93.72	229.018.000,00
1.01.02.2.01.54		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	23,435,000,000.00	23,433,850,000.00	100	1.150.000,00
1.01.02.2.01.55		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	380,742,000.00	379,460,000.00	99.66	1.282.000,00
1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	427.725.080.420,00	417.498.674.159,00	97.61	10.226.406.261,00
1.01.02.2.02.03		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	10,382,662,918.00	9,820,031,019.00	94.58	562.631.899,00
1.01.02.2.02.04		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1,514,547,846.00	1,513,401,046.00	99.92	1.146.800,00
1.01.02.2.02.05		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3,200,343,199.00	3,200,343,199.00	100	0
1.01.02.2.02.06		Pembangunan Laboratorium	6,081,567,532.00	5,768,220,772.00	94.85	313.346.760,00
1.01.02.2.02.07		Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula	6,925,204,808.00	6,666,801,451.00	96.27	258.403.357,00
1.01.02.2.02.09		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	4,235,280,788.00	3,480,554,091.00	82.18	754.726.697,00
1.01.02.2.02.11		Pembangunan Kantin Sekolah	2,533,484,500.00	1,891,107,705.00	74.64	642.376.795,00
1.01.02.2.02.12		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	49,457,662,776.00	49,223,638,952.00	99.53	234.023.824,00
1.01.02.2.02.14		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,963,799,500.00	1,946,962,100.00	99.14	16.837.400,00
1.01.02.2.02.24		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	396,376,000.00	395,221,200.00	99.71	1.154.800,00



1.01.02.2.02.25		Pengadaan Mebel Sekolah	26,200,803,371.00	25,581,233,154.00	97.64	619.570.217,00
1.01.02.2.02.27		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	117,889,920,949.00	117,366,378,906.00	99.56	523.542.043,00
1.01.02.2.02.32		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	9,582,500,000.00	9,582,500,000.00	100	0
1.01.02.2.02.38		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1,152,185,000.00	1,152,035,420.00	99.99	149.580,00
1.01.02.2.02.41		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	698,040,000.00	693,824,000.00	99.4	4.216.000,00
1.01.02.2.02.42		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	25,348,250,000.00	25,131,622,908.00	99.15	216.627.092,00
1.01.02.2.02.43		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	100	0
1.01.02.2.02.48		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	316,000,000.00	316,000,000.00	100	0
1.01.02.2.02.51		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	580,249,000.00	447,145,318.00	77.06	133.103.682,00
1.01.02.2.02.52		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1,820,454,400.00	1,662,880,000.00	91.34	157.574.400,00
1.01.02.2.02.54		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	749,377,900.00	749,377,900.00	100	0
1.01.02.2.02.59		Pembangunan Ruang Kelas Baru	52,958,956,653.00	47,294,425,411.00	89.3	5.664.531.242,00
1.01.02.2.02.61		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	16,278,056,000.00	16,220,852,000.00	99.65	57.204.000,00
1.01.02.2.02.62		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	62,420,155,000.00	62,384,121,780.00	99.94	36.033.220,00



1.01.02.2.02.67		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	23,639,202,280.00	23,609,995,827.00	99.88	29.206.453,00
1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	174.161.661.535,00	171.913.527.615,00	98.71	2.248.133.920,00
1.01.02.2.03.02		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	31,096,860,752.00	30,620,863,078.00	98.47	475.997.674,00
1.01.02.2.03.07		Pengadaan Mebel PAUD	1,194,885,000.00	1,194,885,000.00	100	0
1.01.02.2.03.09		Pengadaan Perlengkapan PAUD	29,618,056,300.00	29,333,688,482.00	99.04	284.367.818,00
1.01.02.2.03.11		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3,600,000,000.00	3,333,840,000.00	92.61	266.160.000,00
1.01.02.2.03.17		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1,519,893,784.00	1,519,783,784.00	99.99	110.000,00
1.01.02.2.03.18		Pengelolaan Dana BOP PAUD	9,939,130,000.00	9,824,635,107.00	98.85	114.494.893
1.01.02.2.03.26		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1,279,184,000.00	1,188,084,744.00	92.88	91.099.256,00
1.01.02.2.03.28		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3,343,603,000.00	3,242,967,700.00	96.99	100.635.300,00
1.01.02.2.03.30		Pembangunan Ruang Kelas Baru	23,740,609,005.00	22,991,077,496.00	96.84	749.531.509,00
1.01.02.2.03.34		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	32,211,297.00	32,211,297.00	100	0
1.01.02.2.03.39		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	750,000,000.00	750,000,000.00	100	0
1.01.02.2.03.40		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	69,084,000.00	69,084,000.00	100	0



1.01.02.2.03.41		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	42,768,116,840.00	42,728,181,910.00	99.91	39.934.930,00
1.01.02.2.03.45		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	753,077,536.00	743,256,736.00	98.7	9.820.800,00
1.01.02.2.03.46		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	21,632,639,721.00	21,554,566,721.00	99.64	78.073.000,00
1.01.02.2.03.51		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2,824,310,300.00	2,786,401,560.00	98.66	37.908.740,00
1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	27.236.345.845,00	26.499.293.603,00	97.29	737052242,00
1.01.02.2.04.10		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	100	0
1.01.02.2.04.17		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2,943,210,000.00	2,778,901,600.00	94.42	164.308.400,00
1.01.02.2.04.27		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1,640,692,500.00	1,137,070,000.00	69.3	503.622.500,00
1.01.02.2.04.39		Pembangunan Ruang Kelas Baru	19,984,589,345.00	19,930,361,024.00	99.73	54.228.321,00
1.01.02.2.04.40		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	567,854,000.00	567,436,000.00	99.93	418.000,00
1.01.02.2.04.52		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	700,000,000.00	685,524,979.00	97.93	14.475.021,00
1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN	79.277.152.400,00	74.313.073.987,00	93.74	4.964.078.413,00
1.01.04.2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD	79.277.152.400,00	74.313.073.987,00	93.74	4.964.078.413,00



		dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				
1.01.04.2.01.01		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	9,797,968,400.00	9,062,458,387.00	92.49	735510013
1.01.04.2.01.02		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	69,479,184,000.00	65,250,615,600.00	93.91	4228568400
2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8.090.634.186,00	7.987.832.465,00	98.73	102.801.721,00
2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	169.265.000,00	152.065.137,00	89.84	17.199.863,00
2.22.02.2.01.01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	55,241,000.00	52,489,624.00	95.02	2751376
2.22.02.2.01.02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	114,024,000.00	99,575,513.00	87.33	14448487
2.22.02.2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	639.983.000,00	620.856.190,00	97.01	19126810,00
2.22.02.2.02.01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	100,680,000.00	98,922,635.00	98.25	1.757.365,00
2.22.02.2.02.02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	39,303,000.00	24,097,450.00	61.31	15.205.550,00



2.22.02.2.02.03		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	500,000,000.00	497,836,105.00	99.57	2.163.895,00
2.22.02.2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.281.386.186,00	7.214.911.138,00	99.09	66.475.048,00
2.22.02.2.03.02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	4,032,281,740.00	4,018,880,502.00	99.67	13.401.238,00
2.22.02.2.03.03		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	3,249,104,446.00	3,196,030,636.00	98.37	53.073.810,00
2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	545.926.000,00	416.189.900,00	76.24	129.736.100,00
2.22.03.2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	545.926.000,00	416.189.900,00	76.24	129.736.100,00
2.22.03.2.01.01		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	238,788,000.00	181,617,800.00	76.06	57.170.200,00
2.22.03.2.01.02		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	146,184,000.00	106,387,900.00	72.78	39.796.100,00
2.22.03.2.01.03		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	160,954,000.00	128,184,200.00	79.64	32.769.800,00
2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	1.646.189.000,00	1.625.074.279,00	98.72	21.114.721,00



2.22.04.2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.646.189.000,00	1.625.074.279,00	98.72	21.114.721,00
2.22.04.2.01.01		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	134,536,000.00	128,238,079.00	95.32	6.297.921,00
2.22.04.2.01.02		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	94,967,000.00	94,328,200.00	99.33	638.800,00
2.22.04.2.01.03		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	1,416,686,000.00	1,402,508,000.00	99,00	14.178.000,00
2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	151.790.260,00	145.032.600,00	95.55	6.757.660,00
2.22.05.2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	93,236,000.00	89,651,000.00	96.15	3.585.000,00
2.22.05.2.01.01		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	93,236,000.00	89,651,000.00	96.15	3.585.000,00
2.22.05.2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	58,554,260.00	55,381,600.00	94.58	3.172.660,00
2.22.05.2.02.01		Pelindungan Cagar Budaya	58,554,260.00	55,381,600.00	94.58	3.172.660,00
2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	63,137,000.00	59,857,402.00	94.81	3.279.598,00
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	63,137,000.00	59,857,402.00	94.81	3.279.598,00
2.22.06.2.01.04		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	63,137,000.00	59,857,402.00	94.81	3.279.598,00



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam Tahun Anggaran 2025.

Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan kegiatan dengan Pagu anggaran sebesar Rp. **2.032.366.418.142,-** (Dua Triliun Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah) sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. **1.975.052.522.092,80,-** (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Sen) atau sebesar **97,18%**. Pada tahun anggaran 2025 semua yang masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah mendapat alokasi anggaran termasuk jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal, hanya saja untuk indikator ini jika diintegrasikan dengan ekstrakurikuler keagamaan dan sosial budaya maka alokasi anggaran tersedia juga melalui dana BOS pusat baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk data siswa yang melanjutkan ke SMP di luar Kabupaten Kutai Timur Dinas Pendidikan masih berupaya mencari datanya melalui sekolah dengan cara merekap data alumni SD melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs mana. Untuk angka putus sekolah (APTs) jenjang SMP sebesar 0,10% atau 20 orang.



4.2 LANGKAH PERBAIKAN

Untuk lebih meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian target Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur kedepan berupaya untuk mengatasi masalah serta kendala yang ada, dengan kiat pemecahah sebagai berikut:

1. Membangun komunikasi dengan berbagai *stakeholder* dan instansi terkait terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mewujudkan komitmen *spending mandatory* 20% APBD selain gaji dan tunjangan untuk sektor pendidikan.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap berbagai produk layanan sektor pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga tercapai *excellent service*.
3. Mencari berbagai peluang sumber anggaran dari APBN dan APBD provinsi untuk menunjang SPM.
4. Memaksimalkan sudut perencanaan pelaksanaan berbagai lini kegiatan dan anggaran.
5. Optimalisasi SDM terhadap tupoksi struktural dan fungsional serta pemetaan tenaga pendidik yang merata.
6. Lebih meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
7. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang menuju prasarana dan sarana yang lebih memadai untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kutai Timur.
8. Pengajuan Peraturan Daerah sebagai landasan operasional di lapangan.



Demikian disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, diharapkan dapat sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja dan juga sebagai media yang masih perlu penyempurnaan sehingga selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur kedepan dalam rangka mewujudkan Pendidikan sebagai praktis pendidikan yang berkualitas.

Sangatta, Februari 2025

Kepala Dinas,



Mulyono, S.S., P.M.Si

NIP. 19770202 199703 004



PERJANJIAN KINERJA

**TAHUN 2025
PERUBAHAN**

**DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Mulyono, S.STP., M.Si**
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 19770202 199703 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ardiansyah Sulaiman**
Jabatan : Bupati Kutai Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Kutai Timur,

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,



Ardiansyah Sulaiman



Mulyono, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770202 199703 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB KUTAI TIMUR

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah	13,20	Tahun
		2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,55	Tahun
		3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100,00	%
		4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun Pendidikan Dasar	100,00	%
		5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 17-18 Pendidikan Kesetaraan	100,00	%
		6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	99,53	%
		7	Kemampuan Literasi SD	60,75	%
		8	Kemampuan Literasi SMP	74,64	%
		9	Kemampuan Numerasi SD	44,46	%
		10	Kemampuan Numerasi SMP	72,36	%
2	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya	11	Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	100,00	%
		12	Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	96,55	%
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	13	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	56,78	
		14	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	53,46	
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	15	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	100,00	%
5	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya	16	Jumlah Ketua Adat yang menerima insentif	175	Orang
		17	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	6	Kegiatan
		18	Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah	11	Fasilitasi
		19	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	45	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya
		20	Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya	100,00	%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 1.007.187.467.277	
2	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Rp 79.277.152.400	
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 8.090.634.186	
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 545.926.000	
5	Program Pembinaan Sejarah	Rp 1.646.189.000	
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 151.790.260	
7	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp 63.137.000	
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 935.404.121.919	
JUMLAH		Rp 2.032.366.418.142	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Kutai Timur,



Ardiansyah Sulaiman

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,



Mulyono, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770202 199703 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. Irma Yuwinda, ST, M.Si**
Pangkat : Pembina Tingkat I / IV.b
NIP : 19800815 200502 2 004
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mulyono, S.STP., M.Si**
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 19770202 199703 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,

Pihak Pertama
Sekretaris,


Mulyono, S.STP., M.Si
Pembina Utama / IV.b
NIP. 19770202 199703 1 004


Hj. Irma Yuwinda, ST, M.Si
Pembina Tk.I /IV.b
NIP. 19800815 200502 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR

Bagian : Sekretariat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
4	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
5	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
6	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
7	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
8	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
9	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Presentase Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.872.411.691	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 889.720.976.412	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 300.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 12.996.801.293	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 3.507.063.629	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 561.776.500	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 21.025.340.894	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.419.751.500	
Total		Rp 935.404.121.919	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,



Mulyono, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770202 199703 1 004

Pihak Pertama

Sekretaris,



Hj. Irma Yuwinda, ST, M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19800815 200502 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hajrah, S.Pd.**
Pangkat : Pembina / IV.a
NIP : 19770728 200604 2 020
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mulyono, S.STP.,M.Si**
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 19770202 199703 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Selaku atasan dari pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas,


Mulyono, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770202 199703 1 004

Pihak Pertama
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian,


Hajrah, S.Pd., M.A.P
Pembina / IV.a
NIP. 19770728 200604 2 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR

Bagian : Sekretariat
Sub : Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
2	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	11351 Paket
3	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
4	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
5	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	993 Paket
6	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	993 Paket
7	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan
8	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit
9	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
10	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 300.000.000	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 2.119.678.000	
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 1.089.306.368	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 9.787.816.925	
4	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Rp 1.196.246.459	
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 789.977.170	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 1.520.840.000	
7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 382.406.500	
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 179.370.000	
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 447.292.000	

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 135.650.000	
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 20.442.398.894	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 567.061.500	
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 270.250.000	
14	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Rp 582.440.000	
Total		Rp 39.810.733.816	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas,


Mulyono S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770202 199703 1 004

Pihak Pertama
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian,


Hajrah, S.Pd., M.A.P
Pembina / IV.a
NIP. 19770728 200604 2 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Uud Sudiharjo, S.Sos., M.E**
Pangkat : Penata Tingkat I / III.d
NIP : 19860313 200904 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mulyono, S.STP., M.Si**
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 19770202 199703 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,

Pihak Pertama
Kabid. Pembinaan SD,


Mulyono, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770202 199703 1 004


Uud Sudiharjo, S.Sos., M.E
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19860313 200904 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR

Bidang : Pembinaan Sekolah Dasar

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	98,66%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	105,71%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	100%
		Rasio Murid/ Guru (SD)	20
		Angka Putus Sekolah (AptS)	0,05
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	85,46%
		Iklim Inklusivitas SD	64,88%
		Iklim Keamanan SD	79,91%
		Iklim Kebinekaan SD	77,91%
2	Terwujudnya SDM yang Beriman, Berakhlak Mulia, dan Berbudaya	Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	100%
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	64,45%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 378.064.379.577	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,


Mulyono S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770202 199703 1 004

Pihak Pertama

Kabid. Pembinaan SD,


Uud Sudiharjo, S.Sos., M.E
Penata Tk. I /III.d
NIP. 19860313 200904 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Moh. Syaiful Imron, S.Pd., M.Si**
Pangkat : Pembina / IV.a
NIP : 19721204 199903 1 008
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter, dan Penilaian Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Uud Sudiharjo, S.Sos., M.E**
Pangkat : Penata Tingkat I / III.d
NIP : 19860313 200904 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Kabid. Pembinaan SD,

Uud Sudiharjo, S.Sos., M.E

Penata Tk. I / III.d

NIP. 19860313 200904 1 002

Pihak Pertama
Kasi. Kurikulum, Peserta Didik,
Pembangunan Karakter, dan Penilaian
SD,

Moh. Syaiful Imron, S.Pd., M.Si

Pembina / IV.a

NIP. 19721204 199903 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR

Bidang : Pembinaan Sekolah Dasar

Seksi : Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter, dan Penilaian

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12.300 Peserta Didik
2	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	1.500 Peserta Didik
3	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	238 Satuan Pendidikan
4	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana	238 Satuan Pendidikan
5	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen
6.	Tersedianya Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	63 Buku

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp 23.300.000.000	
2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 750.000.000	
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp 2.000.000.000	
4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp 58.055.968.000	
5	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 1.400.000.000	

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
6	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp 30.729.644.500	
Total		Rp 116.235.612.500	

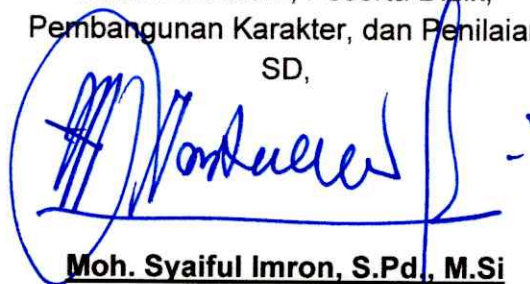
Pihak Kedua
Kabid. Pembinaan SD,



Uud Sudiharjo, S.Sos., M.E
Penata Tk. I /III.d
NIP. 19860313 200904 1 002

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kasi. Kurikulum, Peserta Didik,
Pembangunan Karakter, dan Penilaian
SD,



Moh. Syaiful Imron, S.Pd., M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19721204 199903 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Chairani Agustina, S.Pd**
Pangkat : Penata Tingkat I / III.d
NIP : 19800824 200604 2 013
Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Uud Sudiharjo, S.Sos., M.E**
Pangkat : Penata Tingkat I / III.d
NIP : 19860313 200904 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Kabid. Pembinaan SD,

Pihak Pertama
Kasi. Kelembagaan dan Sarana
Prasarana SD,

Uud Sudiharjo, S.Sos., M.E
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19860313 200904 1 002

Chairani Agustina, S.Pd
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19800824 200604 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR

Bidang : Pembinaan Sekolah Dasar
Seksi : Kelembagaan dan Sarana Prasarana

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun	18 Ruang
2	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	52 Ruang
3	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	16 Ruang
4	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	215 Unit
5	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit
6	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang
7	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang
8	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Unit
9	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	100 Paket

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	7 Unit
11	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	21 Paket
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	64 Ruang
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang
14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	22 Paket

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Rp 2.108.026.177	
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 6.775.282.332	
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 1.039.099.078	
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 26.209.602.754	
5	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp 1.400.000.000	
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Rp 737.683.000	
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp 179.403.000	
8	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp 664.546.100	
9	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp 77.856.380.000	
10	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 373.226.800	
11	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp 112.331.694.991	
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 26.161.850.460	
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 3.644.461.000	

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp 380.742.000	
Total		Rp 259.861.997.692	

Pihak Kedua
Kabid. Pembinaan SD,



Uud Sudihario, S.Sos., M.E
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19860313 200904 1 002

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kasi. Kelembagaan dan Sarana
Prasarana SD,



Chairani Agustina, S.Pd
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19800824 200604 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ilham, S.Ag., M.Pd**
Pangkat : Pembina / IV.a
NIP : 197504 10200212 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mulyono, S.STP., M.Si**
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 19770202 199703 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,


Mulyono, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770202 199703 1 004

Pihak Pertama

Kabid. Pembinaan SMP,


Ilham, S.Ag., M.Pd

Pembina / IV.a
NIP. 19750410 200212 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR

Bidang : Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	66,84%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	81,37%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	100%
		Rasio Murid/ Guru (SMP)	20,00
		Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs	0,05
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%
		Iklim Inklusivitas SMP	66,71%
		Iklim Keamanan SMP	77,96%
		Iklim Kebinekaan SMP	75,84%
2	Terwujudnya SDM yang Beriman, Berakhlak Mulia, dan Berbudaya	Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	96,55%
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	63,99%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 427.725.080.420	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Pihak Pertama

Kabid. Pembinaan SMP,


Mulyono, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19770202 199703 1 004


Ilham, S.Ag., M.Pd

Pembina/ IV.a

NIP. 19750410 200212 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Cithra, S.STP., M.Adm.SDA**
Pangkat : Pembina / IV.a
NIP : 19850510 200312 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter, dan Penilaian Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ilham, S.Ag., M.Pd**
Pangkat : Pembina / IV.a
NIP : 19750410 200212 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Kabid. Pembinaan SMP,

Ilham, S.Ag., M.Pd
Pembina / IV.a
NIP. 19750410 200212 1 006

Pihak Pertama
Kasi. Kurikulum, Peserta Didik,
Pembangunan Karakter, dan Penilaian
SMP,

Cithra, S.STP., M.Adm.SDA
Pembina / IV.a
NIP. 19850510 200312 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR

Bidang : Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Seksi : Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter, dan Penilaian

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4000 Peserta Didik
2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	92 Satuan Pendidikan
4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	92 Satuan Pendidikan
5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	300 Orang
6	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	90 Orang
7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan,	3 Dokumen

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Layanan di Bidang Pendidikan	Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
8	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen
9	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas
10	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5000 Buku
11	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	18700 Paket

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp 9.582.500.000	
2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 1.152.185.000	
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp 698.040.000	
4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Rp 25.348.250.000	
5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp 1.400.000.000	
6	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp 316.000.000	
7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 580.249.000	
8	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 1.820.454.400	
9	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 749.377.900	
10	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp 16.278.056.000	
11	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp 62.420.155.000	
Total		Rp 120.345.267.300	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kabid. Pembinaan SMP,



Ilham, S.Ag., M.Pd

Pembina / IV.a

NIP. 19750410 200212 1 006

Pihak Pertama

Kasi. Kurikulum, Peserta Didik,
Pembangunan Karakter, dan Penilaian
SMP,



Cithra, S.STP., M.Adm.SDA

Pembina / IV.a

NIP. 19850510 200312 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhamat Fathurahman, S.H.**
Pangkat : Penata Tingkat I / III.d
NIP : 19841124 201101 1 005
Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ilham, S.Ag., M.Pd**
Pangkat : Pembina / IV.a
NIP : 19750410 200212 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Kabid. Pembinaan SMP,

Ilham, S.Ag., M.Pd
Pembina / IV.a
NIP. 19750410 200212 1 006

Pihak Pertama
Kasi. Kelembagaan dan Sarana
Prasarana SMP,

Muhamat Fathurahman, S.H.
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19841124 201101 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR

Bidang : Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Seksi : Kelembagaan dan Sarana Prasarana

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang
2	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang
3	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang
4	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang
5	Terlaksananya Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	5 Ruang
6	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit
7	Terlaksananya Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit
8	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit
9	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang
10	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah DirehabilitasiSedang/Berat	1 Unit
11	Terlaksananya Pengadaan	Jumlah Mebel Sekolah yang	4788 Paket

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Mebel Sekolah	Tersedia	
12	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1828 Paket
13	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	812 Paket

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 10.382.662.918	
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 1.514.547.846	
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 3.200.343.199	
4	Pembangunan Laboratorium	Rp 6.081.567.532	
5	Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula	Rp 6.925.204.808	
6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Rp 4.235.280.788	
7	Pembangunan Kantin Sekolah	Rp 2.533.484.500	
8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 49.457.662.776	
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 1.963.799.500	
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 396.376.000	
11	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp 26.200.803.371	
12	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp 117.889.920.949	
13	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp 23.639.202.280	
Total		Rp 254.420.856.467	

Pihak Kedua
Kabid. Pembinaan SMP,



Ilham, S.Ag., M.Pd
Pembina / IV.a
NIP. 19750410 200212 1 006

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kasi. Kelembagaan dan Sarana
Prasarana SMP,



Muhamat Fathurahman, S.H.
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19841124 201101 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abbas Husaini, S.Ag., M.Pd**
Pangkat : Pembina / IV.a
NIP : 19720617 200701 1 021
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mulyono, S.STP., M.Si**
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 19770202 199703 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

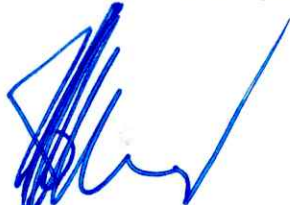
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,


Mulyono, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770202 199703 1 004

Pihak Pertama
Kabid. Pembinaan Ketenagaan,


Abbas Husaini, S.Ag., M.Pd
Pembina / IV.a
NIP. 19720617 200701 1 021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR

Bidang : Pembinaan Ketenagaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV SD dan SMP	100,00%
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi Minimal D4/S1	60,00%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.	Rp 79.277.152.400	
Total		Rp 79.277.152.400	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,


Mulyono, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770202 199703 1 004

Pihak Pertama

Kabid. Pembinaan Ketenagaan,


Abbas Husaini, S.Ag., M.Pd

Pembina / IV.a
NIP. 19720617 200701 1 021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. Rosnia. S.Pd., M.Pd**
Pangkat : Pembina / IV.a
NIP : 19680404 200801 2 023
Jabatan : Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Abbas Husaini, S.Ag., M.Pd**
Pangkat : Pembina / IV.a
NIP : 19720617 200701 1 021
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kabid. Pembinaan Ketenagaan,

Abbas Husaini, S.Ag., M.Pd

Pembina / IV.a

NIP. 19720617 200701 1 021

Pihak Pertama

Kasi. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF,

Hj. Rosnia, S.Pd., M.Pd

Pembina / IV.a

NIP. 19680404 200801 2 023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR

Bidang : Pembinaan Ketenagaan
Seksi : Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20 Dokumen
2	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rp 9.797.968.400	
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rp 69.479.184.000	
Total		Rp 79.277.152.400	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kabid. Pembinaan Ketenagaan,

Abbas Husaini, S.Ag., M.Pd

Pembina / IV.a

NIP. 19720617 200701 1 021

Pihak Pertama

Kasi. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF,

Hj. Rosnia, S.Pd., M.Pd

Pembina / IV.a

NIP. 19680404 200801 2 023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Heri Purwanto, S.Pd.AUD., M.Pd.**
Pangkat : Penata Tingkat I / III.d
NIP : 19710404 200105 1 001
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Nonformal/Kesetaraan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mulyono, S.STP., M.Si**
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 19770202 199703 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,


Mulyono, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770202 199703 1 004

Pihak Pertama

Plt. Kabid Pembinaan PAUD dan PNF,


Heri Purwanto, S.Pd.AUD.,M.Pd.
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19710404 200105 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR

Bidang : Pembinaan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	72,57%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun PAUD	100,00%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Pendidikan Kesetaraan	100,00%
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	65,00%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp 174.161.661.535	
2	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rp 27.236.345.845	
Total		Rp 201.398.007.380	

Sangatta, 27 Oktober 2025

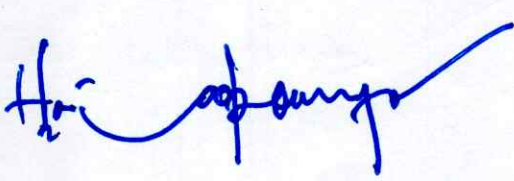
Pihak Kedua

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,


Mulyono, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770202 199703 1 004

Pihak Pertama

Plt. Kabid Pembinaan PAUD dan PNF,



Heri Purwanto, S.Pd.AUD.,M.Pd.
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19710404 200105 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Heri Purwanto, S.Pd.AUD., M.Pd.**
Pangkat : Penata Tingkat I / III.d
NIP : 19710404 200105 1 001
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang PAUD dan PNF

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Heri Purwanto, S.Pd.Aud., M.Pd.**
Pangkat : Penata Tingkat I / III.d
NIP : 19710404 200105 1 001
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Nonformal/Kesetaraan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Plt. Kabid Pembinaan PAUD dan PNF,

Heri Purwanto, S.Pd.Aud., M.Pd.

Penata Tingkat I / III.d

NIP. 19710404 200105 1 001

Pihak Pertama

Plt. Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF,

Heri Purwanto, S.Pd.AUD., M.Pd.

Penata Tingkat I / III.d

NIP. 19710404 200105 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR

Bidang : Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Nonformal (PNF)

Seksi : Kelembagaan dan Sarana Prasarana

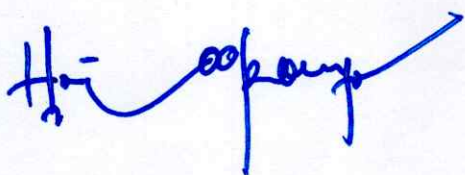
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	44 Unit
2	Terlaksananya Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	3346 Paket
3	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	4 Paket
4	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang
5	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	24 Ruang
6	Terlaksananya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit
7	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	23055 Paket
8	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit
9	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	4636 Paket
10	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang
11	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	11 Ruang
12	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket
13	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	7 unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp 31.096.860.752	
2	Pengadaan Mebel PAUD	Rp 1.194.885.000	
3	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Rp 29.618.056.300	
4	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Rp 3.343.603.000	
5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 23.740.609.005	
6	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Rp 69.084.000	
7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp 42.768.116.840	
8	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp 753.077.536	
9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Rp 21.632.639.721	
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 2.824.310.300	
11	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 19.984.589.345	
12	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp 567.854.000	
13	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Rp 700.000.000	
Total		Rp 178.293.685.799	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Plt. Kabid Pembinaan PAUD dan PNF,



Heri Purwanto, S.Pd.Aud.,M.Pd.

Penata Tingkat I / III.d

NIP. 19710404 200105 1 001

Pihak Pertama

Plt. Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF,



Heri Purwanto, S.Pd.AUD.,M.Pd.

Penata Tingkat I / III.d

NIP. 19710404 200105 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Heri Purwanto, S.Pd.AUD., M.Pd.**
Pangkat : Penata Tingkat I / III.d
NIP : 19710404 200105 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian Bidang PAUD dan PNF
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Heri Purwanto, S.Pd.AUD., M.Pd.**
Pangkat : Penata Tingkat I / III.d
NIP : 19710404 200105 1 001
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Nonformal/Kesetaraan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Plt. Kabid Pembinaan PAUD dan PNF,

Heri Purwanto, S.Pd.Aud.,M.Pd.

Penata Tingkat I / III.d

NIP. 19710404 200105 1 001

Pihak Pertama

Kasi. Kurikulum, Peserta Didik,
Pembangunan Karakter dan Penilaian
PAUD dan PNF,

Heri Purwanto, S.Pd.AUD.,M.Pd.

Penata Tingkat I / III.d

NIP. 19710404 200105 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR

Bidang : Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Nonformal (PNF)

Seksi : Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15.482 Peserta Didik
2	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	344 Satuan Pendidikan
3	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	344 Satuan Pendidikan
4	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen
5	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 Peserta Didik
6	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	345 Orang
7	Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3.387 Peserta Didik
8	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan
9	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	1 Dokumen

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Layanan di Bidang Pendidikan	

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Rp 3.600.000.000	
2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp 1.519.893.784	
3	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp 9.939.130.000	
4	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 1.279.184.000	
5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Rp 32.211.297	
6	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp 750.000.000	
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Rp 1.400.000.000	
8	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Rp 2.943.210.000	
9	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 1.640.692.500	
Total		Rp 23.104.321.581	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Plt. Kabid Pembinaan PAUD dan PNF,



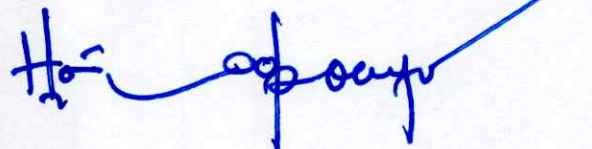
Heri Purwanto, S.Pd.Aud.,M.Pd.

Penata Tingkat I / III.d

NIP. 19710404 200105 1 001

Pihak Pertama

Kasi. Kurikulum, Peserta Didik,
Pembangunan Karakter dan Penilaian
PAUD dan PNF,



Heri Purwanto, S.Pd.AUD.,M.Pd.

Penata Tingkat I / III.d

NIP. 19710404 200105 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Padliyansyah, S.E.**
Pangkat : Penata Tingkat I / III.d
NIP : 19701204 200502 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Mulyono, S.STP., M.Si**
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 19770202 199703 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

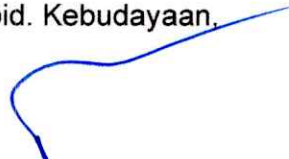
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,


Mulyono, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770202 199703 1 004

Pihak Pertama
Kabid. Kebudayaan,


Padliyansyah, S.E.
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19701204 200502 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR

Bidang : Kebudayaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentasenya Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%
2	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%
3	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%
4	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%
5	Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%
6	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	100%
7	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Terlaksanannya Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksanannya Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 169.265.000	
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 639.983.000	
3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 7.281.386.186	
4	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 545.926.000	
5	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 1.646.189.000	
6	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Rp 93.236.000	
7	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Rp 58.554.260	
8	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Rp 63.137.000	
Total		Rp 10.497.676.446	

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,


Mulyono S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770202 199703 1 004

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kabid. Kebudayaan,


Padliyansyah, S.E.
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19701204 200502 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **David Hernanda, S.Sos**
Pangkat : Penata / III.c
NIP : 19820213 200701 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah, Tradisi dan Kesenian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Padliyansyah, S.E.**
Pangkat : Penata Tingkat I / III.d
NIP : 19701204 200502 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Kabid. Kebudayaan,

Pihak Pertama
Kasi. Cagar Budaya, Permuseuman,
Sejarah, Tradisi, dan Kesenian

Padliyansyah, S.E.
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19701204 200502 1 001

David Hernanda, S.Sos
Penata / III.c
NIP. 19820213 200701 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR

Bidang : Kebudayaan
Seksi : Tenaga Kebudayaan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek
2	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang
3	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek
4	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan
5	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	50 Sertifikat
6	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	100 Orang

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	30 Unit
8	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	4 Objek
9	Terlaksananya Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	4 Objek
10	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp 55.241.000	
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Semua Kelurahan/ Desa	Rp 114.024.000	
3	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Rp 100.680.000	
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Rp 39.303.000	
5	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan	Rp 500.000.000	

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		
6	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Rp 4.032.281.740	
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Rp 3.249.104.446	
8	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Rp 93.236.000	
9	Pelindungan Cagar Budaya	Rp 58.554.260	
10	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Rp 63.137.000	
Total		Rp 8.305.561.446	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Kabid. Kebudayaan,

Padliyansyah, S.E.
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19701204 200502 1 001

Pihak Pertama
Kasi. Cagar Budaya, Permuseuman,
Sejarah, Tradisi, dan Kesenian,

David Hernanda, S.Sos
Penata / III.c
NIP. 19820213 200701 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andi Rosdiana Hafid , S.Sos**
Pangkat : Penata Tingkat I / III.d
NIP : 19701028 200112 2 003
Jabatan : Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Padliyansyah, S.E.**
Pangkat : Penata Tingkat I / III.d
NIP : 19701204 200502 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Kabid. Kebudayaan,

Padliyansyah, S.E.
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19701204 200502 1 001

Pihak Pertama
Kasi. Tenaga Kebudayaan,


Andi Rosdiana Hafid, S.E.
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19701028 200112 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR

Bidang : Kebudayaan
Seksi : Tenaga Kebudayaan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang
2	Terlaksananya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	25 Sertifikat
3	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga
4	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten /Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	10 Orang
5	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	2 Unit
6	Terlaksananya Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Rp 238.788.000	
2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Rp 146.184.000	
3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Rp 160.954.000	
4	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten /Kota	Rp 134.536.000	
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Rp 94.967.000	
6	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Rp 1.416.686.000	
Total		Rp 2.192.115.000	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Kabid. Kebudayaan,

Padliyansyah, S.E.
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19701204 200502 1 001

Pihak Pertama
Kasi. Tenaga Kebudayaan,


Andi Rosdiana Hafid, S.E.
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19701028 200112 2 003

LAMPIRAN

PENGHARGAAN DAN PRESTASI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI

TIMUR

TAHUN 2025

NO	NAMA PENGHARGAAN	ASAL PEROLEHAN
1	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kutai Timur, Peringkat 1 Kategori Perangkat Daerah dengan Kualifikasi “INFORMATIF”	Kabupaten Kutai Timur
2	Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur, Terbaik 1 Kategori Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur Sebagai Badan Publik “INFORMATIF”	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur



